

LAMPIRAN



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205

S E M A R A N G

Semarang, 27 Sept 2000.

Nomor : 070/ **5110** /IX/2000.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijanranata Semarang No. B.2.02/053/UKS.05/IX/2000 tgl 26 Sept 2000 tentang maksud Sdr. SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI akan mengadakan penelitian berjudul : "PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT. KARASEWO SEMARANG", untuk skripsi.

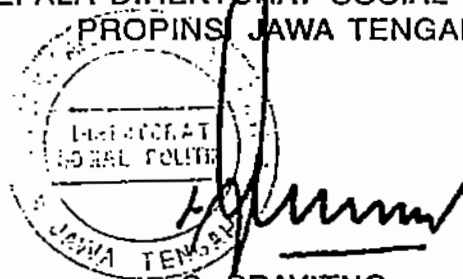
Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 2 Okt - 1 Jan 2001
Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH LH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e : mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 4960 / P / IX / 2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 27 September 2000 no. 070 / 5110 / IX / 2000
2. Surat dari Dekan FH UNIKA Soegijarjana Semarang
tgl. 26 September 2000 nomor B.2.02/053/UKS.05/IX/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Kimihalu No. 29 RT 01/II Semarang
4. Penanggungjawab : Y. ENDANG WAHYATI, SE, ME :
5. Maksud tujuan : untuk Skripsi Judul :
research/survey " PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA
KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT
KARANGSEWU SEMARANG "
6. Lokasi : Kota Semarang

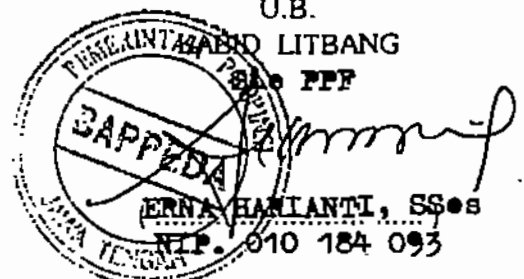
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
2 Oktober 2000 s.d 1 Januari 2001

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 27 September 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

TEMBUSAN :

1. ~~Bakorstanasda Jateng / DIY.~~
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. ~~Bupati~~ Walikotamadia Semarang
5. Arsip.





pt. KARANGSEWU

JL. CITARUM SELATAN NO. 38 SEMARANG
JL. MAJAPAHIT NO. 591 TELP. 024-6708014 - FAX. 024-414841

Bank : BPD Jateng
Anggota Gapensi
Nomor : 11/33/0005

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 010/I/KS/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Sunandar Widjaja
J a b a t a n : Direktur II PT. KARANGSEWU

Dengan ini menerangkan, bahwa :

N a m a : Sri Purwestri Yuana Setyowati
Nim / Nirm. : 95.20.1309 / 95.6.111.01000.50103
Fakultas : Hukum, Universitas Katolik
Soegijapranata

Benar - benar telah melakukan Survey / Penelitian di-
P.T. KARANGSEWU, SEMARANG, pada tanggal 1 Nopember 2000
sampai dengan 20 Desember 2000, untuk memperoleh bahan
bahan yang diperlukan bagi penyusunan Skripsi yang ber-
judul :

" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA
KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA
P.T. KARANGSEWU, SEMARANG "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2001

PT. KARANGSEWU

PT. KARANGSEWU

JL. CITARUM SELATAN 38

TELP. 288851

SEMARANG

(Sunandar Widjaja)

Direktur II

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET/28/122000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Hj. Helmi Setiani, SE**
Jabatan : **Kabid Umum & SDM**
Semarang Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero)

Menerangkan bahwa :

N a m a : **SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI**
N I M : **95.20.1309**
UNIVERSITAS : **UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA**
SEMARANG

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian / Riset pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Semarang terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2000 sampai dengan 30 Nopember 2000 dengan baik.
Telah diberikan bimbingan dan pengarahan untuk pembuatan Skripsi dengan judul :
" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONSTRUKSI
BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT KARANGSEWU SEMARANG "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : Di Semarang
PADA TANGGAL : 04 Desember 2000

JAMSOSTEK
KANTOR CABANG
Hj. Helmi Setiani, SE
Bidang Umum & SDM

**TABEL PENSIJIAN SANTUNAN TUNJANGAN
CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT
LAINNYA**

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
Kedua belah mata	70
Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
Pendengaran pada kedua belah telinga	40
Pendengaran pada sebelah telinga	20
Ibu jari tangan kanan	15
Ibu jari tangan kiri	12
Telunjuk tangan kanan	9
Telunjuk tangan kiri	3
Salah satu jari lain tangan kanan	4
Salah satu jari lain tangan kiri	3
Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
Salah satu ibu jari kaki	5
Salah satu jari telunjuk kaki	3
Salah satu jari kaki lain	2

CACAT-CACAT LAINNYA	% X UPAH
Terkelupasnya kulit kepala	10 - 30
Impotensi	30
Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm 5 - 7,5 cm 7,5 cm atau lebih	10 20 30
Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
Kehilangan daun telinga sebelah	5
Kehilangan kedua belah daun telinga	10
Cacat hilangnya cuping hidung	30
Perforasi sekak rongga hidung	15
Kehilangan daya pencernaan	10
Hilangnya kemampuan kerja fisik	40
- 50% - 70%	20
- 25% - 50%	5
- 10% - 25%	70
Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	7
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan	
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : $(3 \times \% \text{ el. peng. terbaik}) + \% \text{ el. peng. terburuk}$.	7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	10
Kehilangan penglihatan warna	7
Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

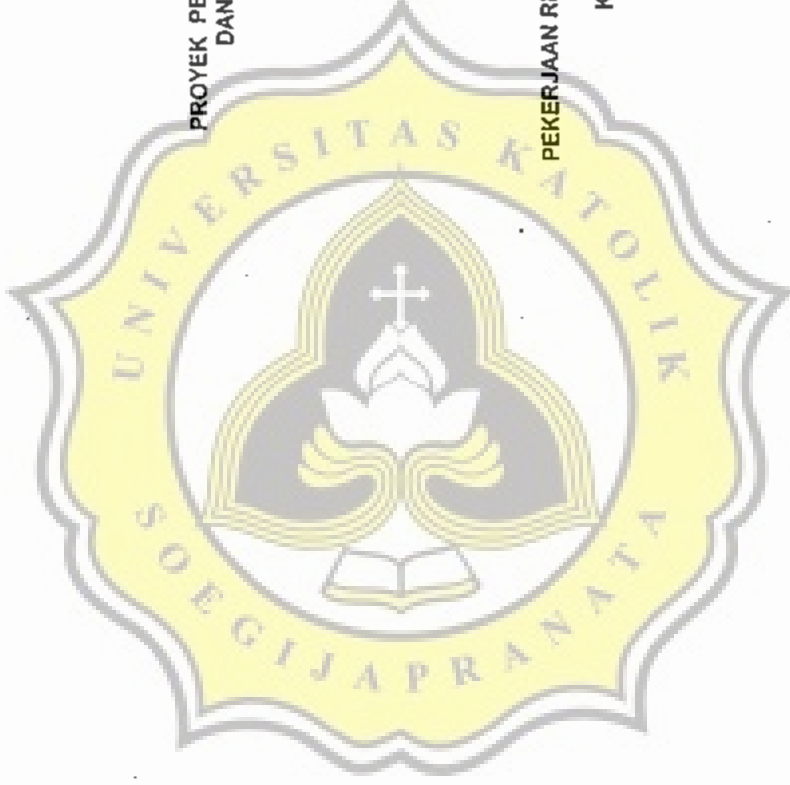
SOEHARTO

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(R K S)**

PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD D/AN MI
DANA PEMBANGUNAN KOTA

TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000
KODYA DATI II SEMARANG

PEKERJAAN REVITALISASI SDN. TAMAN PEKUNDEN 01. 02. 03
KECAMATAN SEMARANG TENGAH



RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT

PROYEK : Pembangunan dan Revitalisasi SD dan MI Dana

Pembangunan Kota

Tahun Anggaran 1999/2000 Kodya Dati II Semarang

PEKERJAAN : Pembangunan SDN TAMAN PEKUNDEN 01. 02. 03

LOKASI : Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

DAFTAR ISIISAN PROYEK (DIP)

NOMOR :
TANGGAL :
TAHUN ANGGARAN : 1999/2000

BAB. I SYARAT - SYARAT UMUM

Pasal 01 : PERATURAN UMUM

Tata laksana dalam penyelenggaraan bangunan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan - peraturan sebagai berikut :

1. Sepanjang idek ada kelentuan lain untuk melaksanakan pekerjaan bangunan borongan di Indonesia, maka yang sah dan mengikat adalah Syarat-syarat Umum (SU) untuk melaksanakan pekerjaan borongan bangunan di Indonesia (A.V) Nomor - 9 tanggal 29 Mei 1941 dan tambahan Lembaran Negara NP. 14571 (khusus pasal-pasal yang masih berlaku)

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Jo Keppres No. 24 Tahun 1995 Keppres No. 8 tahun 1997 Keppres No. 6 tahun 1999

3. Pedoman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 1973 / 1974

4. SEB (Surat Edaran Bersama) Bappenas dan Departemen Keuangan RI, tentang harga satuan terlinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Tahun Anggaran 1999 / 2000

Nomor : 139 / D.V / 09.1999

SE.07/A/21/0/99

Tanggal : 11 Januari 1999

Pasal 02 :

PEMBERI TUGAS PEKERJAAN

Pemberi Tugas Pekerjaan ini ialah :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Penanggung Jawab Proyek

Sedang Pemimpin Proyek dijabat oleh :

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Pasal 03 : PERENCANA

Perencana Pekerjaan ini ialah : PT. Gardha Mandiri Tunggal Jl. Jomblangsari LI II No 12 Semarang.

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 285/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997. Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

6. a. Keputusan Menteri P.U.R.I. No. 61/KPTS/1981, tentang Prosedur Pokok Pengadaan Jasa Bangunan Gedung Negara

- b. Keputusan Menteri PU RI No. 147/KOTS/1991, tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penawaran Kontrak Harga Satuan Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi tanggal 28 Maret 1991

7. Peraturan Pemerintah Daerah setempat

8. Keppres RI. No. 24 tahun 1995 tentang perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN tanggal 28 April 1995

9. SKB Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kelua Bappenas No. :

KeP-27/MK-3/8/1994

KeP-166/Kel/8/1994

tanggal 4 Agustus 1994, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres RI No. 16 th. 1994 tentang Pelaksanaan APBN

10. Keppres RI No. 8 tahun 1997 tanggal 14 Maret 1997, tentang Perubahan Atas Keppres No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No 24 tahun 1995

11. Keppres No. 6 tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999

Pasal 04 : DIREKSI PEKERJAAN

Yang bertindak sebagai Direksi Pekerjaan ialah Badan Pengawas Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas P dan K Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Surat Keputusan.

Pasal 05 : TENAGA PENGAWAS LAPANGAN

- 5.1. Sebagai Tenaga Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan sehari-hari ditempat pekerjaan, akan ditunjuk diangkat oleh Kepala Dinas P dan K Kodya Dati II Semarang dengan SK
- 5.2. Tenaga Pengawas Lapangan atau Direksi Lapangan, tidak dibenarkan merubah ketentuan-ketentuan Pelaksanaan, sebelum mendapat izin atau sepengetahuan dari Koordinator Pengawas dan Pemimpin Proyek.
- 5.3. Bilamana Tenaga Pengawas Lapangan atau Direksi Lapangan menjumpai kelalaian-kelalaian, kelangkaan-kejangkaan di lapangan atau adanya penyimpangan-penyimpangan dari RKS yang ada, supaya segera memberitahukan kepada Koordinator Pengawas atau Pemimpin Proyek
- 5.4. Disamping Tenaga Pengawas Lapangan atau Direksi Lapangan yang ditunjuk, maka Koordinator Pengawas juga diberi tugas untuk mengadakan pengawasan terhadap terlaksana pada pekerjaan-pekerjaan yang menyusul segit konstruksi atau pekerjaan-pekerjaan yang perlu mendapat perhatian.

Pasal 06 : PEMBORONG

Perusahaan berstatus Badan Hukum yang usaha pokoknya adalah melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan yang memenuhi syarat-syarat bonafitas dan kualitas menurut Panitia Pelanggaran yang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tersebut setelah SKPP + SPMK diterbitkan oleh Pemimpin Proyek. Mempunyai TDR Kodya Dati II Semarang Provinsi Dati I Jawa Tengah dengan klasifikasi A Bangunan Perumahan dan Pemukiman, masuk dalam Daftar Rekanan Terseleksi yang ditetapkan oleh Walikota-madya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang t.n. 1999/2000

Pasal 07 : PEMBERIAN PENJELASAN

1. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diadakan pada :
 - a. Hari : Kamis
 - b. Tanggal : 12 Agustus 1999.
 - c. Jam : 09.00 Wib.
 - d. Tempat : SDN. Peterongan 01.02.03 Jl. Kompol Maksu
2. Bagi mereka yang tidak dapat mengikuti aanwijzing lldak diperbolehkan kan mengikuti Pelelangan

Pasal 08 : PELELANGAN

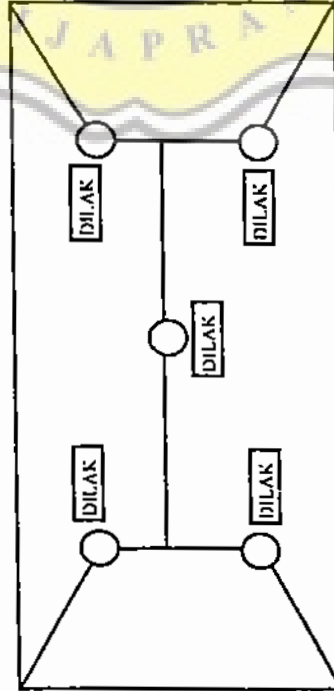
1. Pelelangan akan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1994 serta perubahannya pada saat aanwijzing
2. Pemasukan Surat Penawaran disampaikan paling lambat pada :
 - a. Hari : Selasa.
 - b. Tanggal : 24 Agustus 1999
 - c. Jam : 09.00 s/d 14.00 Wib
 - d. Tempat : Kantor Dinas P dan K Kodya Dati II Semarang
Jl. Tunku Umar No.56
3. Pembukaan Surat Penawaran akan dilaksanakan oleh Panitia pada :
 - a. Hari : Kamis
 - b. Tanggal : 26 Agustus 1999
 - c. Jam : 09.00 s/d Selesai
 - d. Tempat : SDN. Peterongan 01.02.03 Jl. Kompol Maksu
4. Wakil Pemborong yang mengikuti / menghadiri pemasukan penawaran harus membawa surat kuasa bermaterai Rp. 2.000,00 dari Direktur Pemborong dan bertanggungjawab penuh.

Pasal 09 : SAMPUL SURAT PENAWARAN

1. Sampul Surat Penawaran berukuran 25 x 40 cm2 berwarna putih dan lldak tembus baca
2. Sampul Surat Penawaran yang sudah berisi surat penawaran lengkap dengan lampiran-lampirannya supaya ditutup (dilem) dan diberi lak lima tempat dan lldak diberi kode cap cincin atau kop perusahaan dan kode-kode lainnya
3. Sampul Surat Penawaran di sebelah kiri atas dan disebelah kanan tengah supaya ditulis alau diketik (periksa contoh sampul surat penawaran) atau dengan ditempel dengan kertas tulisan/kelikan dengan huruf besar.

CONTOH SAMPUL SURAT PENAWARAN

SURAT PENAWARAN	
PELAKSANAAN PEKERJAAN	
HARI	:
TANGGAL	:
WAKTU	:
TEMPAT	:
KUPADA YTH.	
.....	



Pasal 10 : SAMPUL SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

Sampul Surat Penawaran tidak sah dinyatakan gugur bilamana

1. Sampul surat penawaran dibuat menyimpang dari atau tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 09
2. Sampul surat penawaran terdapat nama penawar dan nama perusahaan penawar atau terdapat harga penawarannya atau terdapat tanda-tanda di luar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 09

Pasal 11. : SYARAT-SYARAT PENAWARAN

- 11.1. Penawaran yang demikian adalah penawaran yang lengkap menurut gambar bestek, semua Peraturan dan Ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan semua Ketenluan Tambahan yang dimuat dalam Ritsalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang ada.
 - 11.2. Surat penawaran (supaya menggunakan contoh terlampir) Rencana Anggaran Biaya; Daftar Analisa Pekerjaan; Surat Kuasa; Surat Kesanggupan Memberikan Jaminan Pelaksanaan; Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Tunduk pada Peraturan Pelelangan; Direktumnya atau Pimplhannya; Surat Kesanggupan untuk Mengikuti Program ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sama dengan OMS (Organisasi Masyarakat Selemat) yang terekomondasi; supaya dibuat diatas kertas dengan kop nama perusahaan yang bersangkutan. Sedang untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Analisa Pekerjaan, cukup hanya lembar didepan saja atau lembar pertama dan lembar-lembar kertas yang lain, bisa menggunakan kertas jenis lain, ukuran folio.
 - 11.3. Surat Penawaran maupun lampiran-lampirannya, jika tidak ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan perusahaan sendiri, tetapi diserahkan kepada seseorang yang diberi kuasa, maka yang bersangkutan harus melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) yang dibuat diatas kertas kop nama perusahaan. Orang yang diberi kuasa tersebut, namanya harus tercantum di dalam Akto Pondirian Perusahaan.
- SAMPUL DAN ISI SURAT PENAWARAN**
- 12.1. Surat penawaran diajukan dalam sampul tertutup
 - 12.2. Sampul surat penawaran disediakan oleh panitia pelanggan atau akan ditentukan lain dan hal ini akan diberitahukan pada waktu Pemberian Penjelasan Pekerjaan. Sampul surat penawaran tersebut supaya dilem, kemudian dilak 5 (lima) tempat pada bagian belakangnya, yaitu 4 (empat) disudut-sudut dan 1 (satu) di tengah sampul
 - 12.3. Sampul surat penawaran, berisi antara lain sebagai berikut :
 - A. Syarat-syarat Teknisk dibuat 5 (lima) ganda terdiri :
 1. Surat penawaran
Surat penawaran yang asli bermaterai Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan. Surat penawaran tersebut supaya diberi tanggal, bulan dan tahun serta dicap perusahaan. Pada materai harus dibubuhkan tanggal, bulan dan tahun. Tanda tangan penawar dan cap perusahaan harus kena pada materai

2. Daftar Rencana Anggaran Biaya atau Daftar Rincian Pekerjaan
3. Daftar Analisa Pekerjaan
4. Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Tenaga dan Harga Satuan Pekerjaan
5. Jadwal waktu pelaksanaan atau Time Schedule
6. Daftar nama-nama pelaksanaan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ini.

B. Syarat-syarat Administrasi dibuat 5 (lima) ganda terdiri :

1. Rekaman Surat Jaminan Penawaran, berupa Surat Jaminan Bank dari BPD atau Bank Pemerintah atau Bank lain atau Lembaga Keuangan (PT. Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja) yang ditetapkan Menleri Keuangan sebesar antara 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari perkiraan harga penawaran. Untuk keseragaman besarnya Jaminan Penawaran ini, maka Panitia Pelelangan akan menetapkan pada waktu penjelasan Umum.
2. Surat pernyataan Kesanggupan memberikan Jaminan Pelaksanaan, minimal sebesar 5% dari Harga Penawaran. Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Jaminan Pelaksanaan tersebut, supaya dibuat diatas kertas kop nama perusahaan yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), diandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan, diberi tanggal, bulan dan tahun serta dicap perusahaan.
3. Rekaman referensi atau Surat Keterangan Bank Pembangunan Daerah yang masih berlaku dan dibuat khusus untuk proyek ini.
4. Rekaman Surat Undangan untuk mengikuti Pelelangan dari panitia pelelangan
5. Rekaman Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku
6. Rekaman Pemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disertai Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Direktorat Jenderal Pajak
7. Rekaman Surat Tanda Daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakuualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang masih berlaku, sesuai dengan bidang pekerjaan yang diikuti pelelangannya
8. Rekaman Surat Tanda Anggota KADIN Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan GAPENSI
9. Rekaman referensi pengalaman pekerjaan untuk bidang usaha yang diprakuualifikasikan, minimal 5 (lima) tahun terakhir

10. Rekaman pemilikan peralatan kerja
11. Neraca perusahaan terakhir
12. Susunan pemilikan modal perusahaan
13. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan atau Daftar Personalia Perusahaannya
14. Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil bagi Direktur atau Pimpinan Perusahaannya
15. Rekaman Surat Pendirian Akte Perusahaan yang terakhir termasuk dengan semua perubahannya.
16. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk tunduk pada peraturan pelelangan
Yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan, diberi tanggal, bulan dan tahun serta dicap perusahaan.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti Program Asuransi Tenaga Kerja atau Aspek, dibuat diatas kertas kop nama perusahaan. Yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan, diberi tanggal, bulan dan tahun serta dicap perusahaan.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk KSO (Kerja Sama Operasional) dengan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)
19. Rekaman, Referensi Pekerjaan dalam bidang pekerjaan sejenis.
20. Semua Surat Pernyataan Kesanggupan dan Surat Keterangan tersebut, supaya dibuat diatas kertas kop nama perusahaan

Perhatian :

- Semua surat-surat yang asli, harus dibawa pada waktu mengikuti pelelangan pekerjaan ini, dan diserahkan kepada panitia, sebelum acara pelelangan pekerjaan dimulai.
- 12.4. Pada sudut kiri atas sampul surat penawaran, baik yang disediakan oleh panitia maupun bukan, supaya ditulis yang jelas dengan huruf batok atau dikelik



**SURAT PENAWARAN PELELANGAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD-MI**

LOKASI DI SDN. TAMAN PEKUNDEN 01. 02. 03

dan pada sudut kanan bawah sampul Surat Penawaran supaya ditulis:

**KEPADA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
DI - SEMARANG**

Pasal 13 : SAMPUL SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

- 13.1. Sampul surat penawaran yang dibuat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada atau terdapat Harga Penawaran atau Tanda-tanda dan atau Kode-kode lain, diluar dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
- 13.2. Pada sampul Surat Penawaran terdapat nama pemenang atau penawar

Pasal 14 : SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

- 14.1. Surat penawaran: Daftar Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Pengerjaan, Surat Kuasa, Surat Kesanggupan, Memberikan Jaminan Pelaksanaan ; Surat Pernyataan untuk Tunduk pada Peraturan Pelelangan dan Surat Kesanggupan untuk Mengikuti Program Astek; tidak dibuat diatas kertas kop nama perusahaan dan Pemborong atau rekanan yang bersangkutan
- 14.2. Surat penawaran tidak dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan tidak dilak di 5 (lima) tempat, sesuai ketentuan yang ada
- 14.3. Surat penawaran yang asli tidak bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan diatas materai tidak dibuatkan salinan, dan materai tidak terkena tanda tangan penawar serta tidak terkena cap perusahaan
- 14.4. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh penawar
- 14.5. Harga penawaran yang tertulis dengan angka, tidak sesuai dengan yang tertulis dengan huruf atau yang tertulis tidak jelas sama sekali
- 14.6. Terdapat salah satu lampiran surat penawaran yang tidak ditandatangani oleh penawar dan tidak di cap perusahaan
- 14.7. Tidak jelas besarnya jumlah penawaran surat penawaran, baik yang tertulis dengan angka maupun yang tertulis dengan huruf

- 14.8. Surat penawaran dikirimkan kepad anggota panitia atau pejabat
- 14.9. Surat penawaran dari pemborong yang tidak dundang
- 14.10. Terdapat lampiran surat penawaran yang tidak sah

**Pasal 15 : PENETAPAN CALON DAN PENGUMUMAN PEMENANG
LELANG**

- 15.1. Panitia lelang akan menetapkan 3 (tiga) calon pemenang pelelangan pekerjaan ini, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku penawaran yang paling menguntungkan Negara dalam arti :
- 15.1.1. Penawaran di bawah Pagu pekerjaan yang diborongan
- 15.1.2. Penawaran secara Teknis dapat diperlangungkan/jawabkan
- 15.1.3. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan
- 15.1.4. Penawaran tersebut adalah yang terendah diantara penawaran-penawaran yang memenuhi syarat-syarat penawaran dan administrasi.
- 15.2. Dalam hal ada dua peserta pelelangan atau lebih mengajukan harga penawaran yang sama, maka Panitia dengan memperhatikan ketentuan yang ada, akan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih besar dan hal ini akan dicatat dalam berita acara.
- 15.3. Panitia membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan calon pemenang. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh panitia, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pelelangan dan cadangan pemenang atau pemenang ulian kedua diantara calon yang diusulkan oleh panitia
- 15.4. Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan, diumumkan oleh panitia kepada para peserta pelelangan dalam suatu pertemuan yang diadakan untuk keperluan tersebut.
- 15.5. Kepada peserta pelelangan yang berkeberatan atas penetapan pemenang pelelangan, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada alasan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, setelah hari pengumuman tersebut.
- 15.6. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan jawaban terhadap sanggahan akan diberikan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.

Pasal 16 : PELELANGAN ULANG

- 16.1. Pelelangan dinyatakan gagal, apabila :
 - 16.1.1. Pelelangan tidak sah, apabila diikuti kurang dari 5 (lima) rekanan.
 - 16.1.2. Penawaran yang memenuhi syarat-syarat ternyata kurang dari 3 (tiga) peserta.
 - 16.1.3. Harga standar atau Pagu Blaya Pekerjaan dilampaui
 - 16.1.4. Dana yang tersedia tidak cukup
 - 16.1.5. Harga-harga yang ditawarkan dianggap tidak wajar
 - 16.1.6. Sanggahan dari rekanan ternyata benar
 - 16.1.7. Berhubung dengan pelbagai hal, tidak memungkinkan mengadakan pelelangan
- 16.2. Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal atau pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri atau pemenang urutan kedua tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana, maka panitia atas permintaan Kepala Dinas mengadakan pelelangan ulang

Pasal 17 : PENUNJUKAN PEMENANG

- 17.1. Pemimpin Proyek akan memberikan pekerjaan kepada rekanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 17.2. Surat keputusan penunjukan pemenang akan diberikan paling cepat 6 (enam) hari kerja dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, setelah pengumuman penetapan pemenang dan setelah habisnya masa sanggahan. Surat keputusan penunjukan tersebut akan segera disampaikan kepada pemenang
- 17.3. Untuk pemborongan pekerjaan ini, pemenang yang bersangkutan sebelum menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak kerja diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan, berupa Surat Jaminan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau dapat juga berupa Jaminan Surety Bond dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh Pemimpin Proyek, maka jaminan penawaran pemenang yang bersangkutan segera dikembalikan
- 17.4. Pemborong atau rekanan yang telah ditunjuk (setelah menerima surat pengumuman lelang) , harus segera menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melaksanakan Pekerjaan
- 17.5. Pemborong atau rekanan yang telah ditunjuk (setelah terima SPK) harus segera menyerahkan Daftar Isian Tenaga Kerja kepada Perum Astek

Pasal 18 : SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- Pekerjaan harus dilaksanakan oleh pemborong atau rekanan yang bersangkutan dan harus sesuai dengan :
- 18.1. Rencana kerja dan Syarat-syarat. Gambar Bestek termasuk Gambar-gambar penjelasannya
 - 18.2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan segala perubahan-perubahannya, yang dimuat dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan.
 - 18.3. Pelunjuk-petunjuk lisan maupun tertulis dari Pemimpin Proyek, Koordinator Pengawas dan Pelugas Teknis Lainnya yang tidak menyimpang dari RKS dan dokumen-dokumen lainnya

Pasal 19 : PENETAPAN UKURAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

- 19.1. Pemborong harus bertanggungjawab atas lepatnya ukuran-ukuran pekerjaan sesuai dengan apa yang tercantum pada gambar bestek
- 19.2. Pemborong berkewajiban untuk meneliti kembali dan mencocokkan semua ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar bestek dan segera memberitahukan kepada Pengawas Teknis Lapangan atau Koordinator Pengawas, jika terdapat kelalaian atau perbedaan atau ketidakcocokan antara gambar yang satu dengan gambar-gambar yang lain
- 19.3. Bilamana ternyata terdapat selisih atau perbedaan atau ketidakcocokan ukuran-ukuran dalam gambar bestek dan RKS, maka RKS inilah yang dijadikan pedoman setelah mempertimbangkan dari segi teknis akan mengembalikan atau menetapkan sebagaimana mestinya
- 19.4. Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan perlu diadakan perubahan-perubahan, maka gambar revisi dengan tanda warna merah dilampirkan gambar aslinya
- 19.5. Semua perubahan pekerjaan yang menyangkut dengan masalah biaya, harus ada persetujuan dari Pemimpin Proyek
- 19.6. Didalam pelaksanaan pekerjaan, Pemborong tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam RKS dan ukuran pada gambar bestek, kecuali seizin Pemimpin Proyek secara tertulis

Pasal 20 : PENJAGAAN DAN PENERANGAN

- 20.1. Pemborong harus mengurus perjalanan di luar jam kerja, baik siang maupun malam hari dalam kompleks pekerjaan, termasuk bangunan yang sudah dikerjakan Kantor Direksi, Gudang Barang, dan lain sebagainya

20.2. Untuk kepentingan keamanan dan penjagaan, perlu diadakan penerangan lampu pada tempat-tempat tertentu atas petunjuk Direksi Lapangan

20.3. Pemborong harus menjaga jangan sampai terjadi kebakaran atau sabotase di tempat pekerjaan, maka pemborong harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran dan alat-alat lain untuk keperluan tersebut di tempat pekerjaan.

20.4. Pemborong bertanggungjawab sepenuhnya atas keamanan bahan bangunan, alat-alat kerja dan lain-lain, yang disimpan dalam gudang dan di lokasi pekerjaan. Apabila sampai terjadi kebakaran atau pencurian, maka pemborong harus segera mendaftarkan ganlinya, demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

20.5. Segala resiko dari kemungkinan kehilangan dan kebakaran yang menimbulkan kerugian, baik pada pelaksanaan pekerjaan dan bahan bangunan yang telah tersedia, gudang maupun lingkungan sekitarnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemborong

Pasal 21 : KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN KERJA

21.1. Bilamana terjadi kecelakaan, maka pemborong harus segera mengambil langkah dan tindakan yang perlu untuk keselamatan si korban dan kejadian ini harus segera diberitahukan kepada Pemimpin Proyek dan juga kepada Perum Aspek untuk diurus dan diselesaikan pertanggungjawabannya

21.2. Pemborong harus memenuhi dan menaati semua Peraturan-peraturan yang ada, tentang perawatan si korban maupun keluarganya.

21.3. Pemborong harus menyediakan obat-obatan yang perlu, yang tersusun menurut syarat-syarat ke Palang Merah dan setiap kali habis digunakan harus segera dilengkapi kembali

21.4. Pemborong harus juga selalu menyediakan air minum yang sudah dimasak di tempat pekerjaan, untuk para pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pasal 22 : PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN

22.1. Pemborong didalam melaksanakan pekerjaan ini, supaya mengutamakan penggunaan bahan-bahan produksi dalam negeri

22.2. Semua bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk pekerjaan ini, sebelum digunakan harus ditunjukkan dulu contoh bahannya untuk mendapatkan persetujuan pemakalan dari Pengawas Teknik Lapangan dan Pemimpin Proyek dan semua bahan bangunan yang digunakan harus berkualitas baik

22.3. Semua bahan bangunan yang telah dinyatakan tidak dapat dipakai atau ditolak Pemakalannya oleh Pemimpin Proyek atau Pengawas Teknik Lapangan, maka bahan tersebut harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan dalam waktu 1 - 24 jam.

Bilamana Pemborong mengebalikan Perintah Penyingkiran Bahan Bangunan Yang Disingketakan oleh Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan, maka bahan bangunan tersebut akan disila, tanpa memberitahukan kepada Pemborong lebih dulu dan ini merupakan resiko Pemborong

22.4. Bilamana Pemborong setelah diperingatkan, tetap melanjutkan pekerjaan dengan bahan-bahan bangunan yang telah dinyatakan tidak dapat dipakai tersebut, maka Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan berhak untuk menyuruh membongkar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemborong itu dan Harus Segera Diganil dengan bahan-bahan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
Semua kesalahan dan keterlambatan ini menjadi resiko dan tanggungjawab Pemborong

22.5. Bilamana Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan sangsi akan mutu atau kualitas bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan pada Proyek atau pekerjaan ini, maka Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan berhak meminta kepada Pemborong untuk memeriksa bahan-bahan bangunan yang disingketakan tersebut kepada seorang yang ahli dalam hal ini.

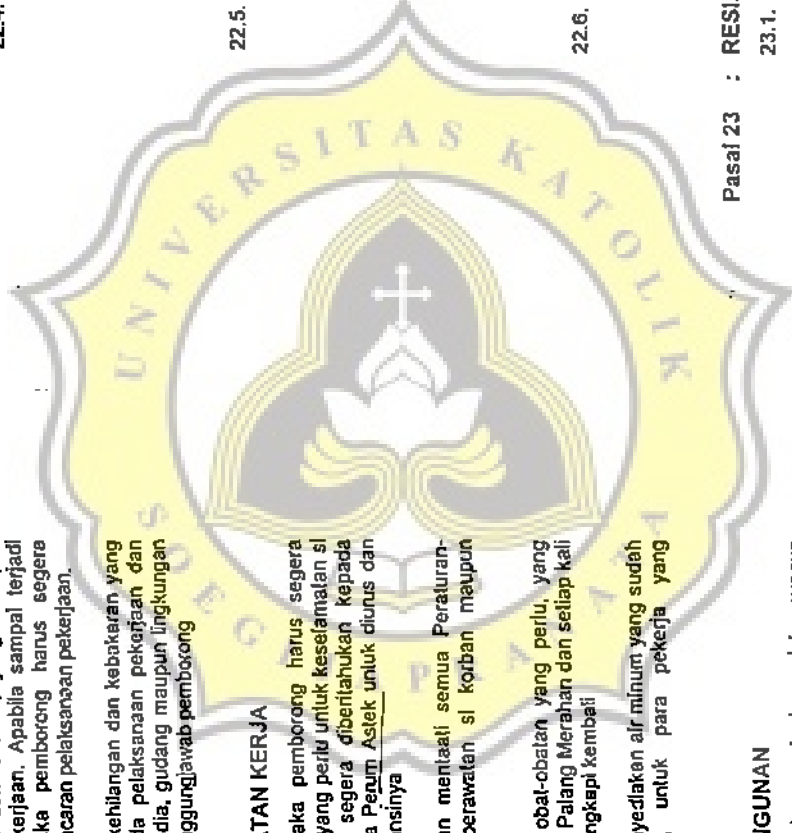
Atau Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan akan minta diperiksa bahan-bahan bangunan tersebut pada laboratorium bahan bangunan yang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan dan semua biaya yang timbul menjadi beban Pemborong

22.6. Semua bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan supaya dicatat dalam buku penerimaan bahan-bahan yang ada di kantor direksi / gudang

Pasal 23 : RESIKO KENAIKAN HARGA DAN FORCE - MAJEURE

23.1. Selama Pemborong melaksanakan pekerjaan ini, Pemborong tidak dapat mengajukan Klaim atau tuntutan kepada Pemberi Tugas, bilamana terjadi adanya kenaikan harga bahan-bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa alat-alat kerja dan lain sebagainya

23.2. Apabila terjadi force majeure, maka pihak Pemborong harus secepatnya memberitahukan kepada Pemberi Tugas secara tertulis, paling lambat sehari setelah adanya peristiwa atau kejadian tersebut, demikian pula bilamana force majeure tersebut berakhir



Pasal 24 : PAPAN NAMA PENGENAL PROYEK

Pada tempat atau lokasi pekerjaan supaya dipasang papan nama pengenalan proyek. Ketentuan papan nama pengenalan proyek tersebut, sebagai berikut :

- 24.1. Papan nama pengenalan proyek dibuat dari bahan kayu dan seng, berukuran 1,00 x 2,00 meter
- 24.2. Cat dasar papan nama pengenalan proyek warna putih
- 24.3. Model huruf balok dan warna huruf hitam
- 24.4. Kaki papan nama pengenalan proyek, supaya dibuat 2 (dua) buah
- 24.5. Pembuatan papan nama pengenalan proyek harus baik, rajin dan kokoh
- 24.6. Dipasang pada tempat yang mudah dilihat umum

Contoh :

PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD/MI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN 1999 / 2000	
1. NAMA PEKERJAAN LOKASI	: PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD-MI KECAMATAN
2. BIAYA	: Rp. (.....
3. VOLUME FISIK	:
4. MANFAAT PROYEK	: Meningkatkan Soran Parasarana Pendidikan
5. PELAKS. MULAI TGL. SELESAI TGL.	:
NAMA PEMBORONG	: PT/IV.
ALAMAT	:

*) Pemasangan papan nama pengenalan proyek, supaya dilaksanakan pada saat pekerjaan akan dimulai kegiatannya

Pasal 25 : LAIN-LAIN

- 25.1. Hal-hal yang belum tercantum dan diuraikan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, akan dijelaskan dalam Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan
Semua penjelasan yang diberikan benikut penambahan, pengurangan atau perubahan-perubahan yang ada, akan dimuat dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan dan merupakan ketentuan yang mengikat disamping RKS dan gambar-gambar bestek yang ada

- 25.2. Rencana Anggaran Biaya supaya dibuat seperti contoh terlampir dalam Dokumen Pelelangan ini. Pada pelelangan pekerjaan ini volume atau kuantitas pekerjaan diberitahukan, tetapi sama sekali tidak mengikat dan merupakan ancar-ancar dan bantuan perhitungan saja. Yang mengikat adalah gambar bestek termasuk gambar-gambar penjelasnya, rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS, serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Pemborong diberi kebebasan sepenuhnya untuk menghitung sendiri sesuai dengan keyaktannya dan tidak perlu terpengaruh oleh volume pekerjaan yang diberikan oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan.

Volume pekerjaan yang diberikan oleh Panitia Pelelangan tersebut bisa dipergunakan untuk bahan pembandingan atau ancer-encer atau untuk bantuan pengecekan perhitungan yang dibuat atau dilakukan oleh Pemborong sendiri. Pemborong tidak bisa mengajukan klaim atau tuntutan pada Panitia Pelelangan Pekerjaan atau kepada siapapun terhadap volume pekerjaan yang diberikan ini.

BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

25.3. Bilamana jenis pekerjaan yang dicantumkan dalam contoh RAB terdapat kekurangan dan untuk itu perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada, maka Pemborong diperkenankan untuk menambah kekurangan pekerjaan menurut itemnya masing-masing, tetapi tidak diperbolehkan mengurangi item pekerjaan

25.4. Daftar analisa yang dipakai untuk menghitung harga satuan pekerjaan pada pekerjaan ini, harus berdasarkan pada analisa BOW yang ada, atau akan ditentukan lain sesuai dengan penjelasan yang diberikan

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang analisa pekerjaannya tidak ada pada buku BOW tersebut, maka Pemborong diberi kebebasan untuk membuat analisa sendiri, sepanjang harga satuan pekerjaan yang diajukan masih dalam batas-batas kewajaran dan dapat dipertanggungjawabkan
Angka rupiah dari harga bahan bangunan, upah tenaga dan sewa alat yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), Daftar Analisa Pekerjaan, Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Tenaga maupun yang tercantum dalam Daftar Harga Satuan Pekerjaan dan Upah Tenaga yang dibuat harus sama.

25.5. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan Analisa Bina Marga akan diberikan penjelasan tersendiri yang lebih rinci

Pasal 01 : JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

1.1. Peserta untuk pelelangan harus menyerahkan surat Penawaran dari Jaminan Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah atau Bank lain atau Bank lain atau lembaga keuangan (PT Persero Asuransi Keuangan Jasa Raharja) , sebesar antara 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari perkiraan harga penawaran

1.2. Jaminan penawaran tersebut segera dikembalikan, apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelelangan

1.3. Jaminan penawaran menjadi milik Pemerintah Daerah, apabila peserta penawaran mengundurkan diri, setelah memasukkan surat penawarannya kedalam kota pelelangan

1.4. Jaminan penawaran dapat diminta kembali, bila harga penawaran peserta pelelangan diatas Pagu yang ada dan juga kepada peserta pelelangan yang penawarannya dinyatakan gugur atau tidak sah oleh Panitia Pelelangan

1.5. Untuk pemenang lelang yang bersangkutan sebelum menandatangani surat perjanjian atau kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan, berupa Surat Jaminan dari Bank Pembangunan Daerah

Pada saat Surat Jaminan Pelaksanaan diterima oleh Pemimpin Proyek, maka Surat Jaminan Penawaran Pemenang yang bersangkutan segera dikembalikan

1.6. Besarnya jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak

1.7. Dalam hal Pemborong atau rekanan menundurkan diri setelah menandatangani kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Daerah, Penunjukan Pemborong atau rekanan berikutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

1.8. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Pemborong atau rekanan setelah Pemborong atau rekanan melaksanakan pekerjaan selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborong atau Kontrak

Pasal 02 : RENCANA KERJA ATAU JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 2.1. Pemborong harus segera menyusun rencana pekerjaan selambalambainya satu minggu, setelah Surat Perintah Kerja atau SPK diterbitkan dan diterima oleh pemborong.
- 2.2. Pemborong harus melaksanakan pekerjaan menurut Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Gambar Rencana beserta Gambar-gambar Penjelasan, yang dibuat dan telah disepakati bersama.
- 2.3. Pemborong tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas selesainya pekerjaan tepat pada waktunya.

PASAL 03 : LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN .

- 3.1. Pemborong diwajibkan membuat Laporan Harian dan Laporan Mingguan, yang menunjukkan Prestasi Kemajuan Fisik Pekerjaan kepada Pemberi Tugas, yang diketahui oleh Koordinator Pengawas Teknis Lapangan dan Pengawas Teknis Lapangan.
- 3.2. Pekerjaan: Prestasi, Kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dikerjakan tidak termasuk tersedianya bahan-bahan bangunan di tempat pekerjaan dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran uang yang telah dilakukan oleh Pemborong
- 3.3. Termasuk pada pembuatan laporan ini yaitu pembuatan laporan pencahayaan dan bangunan, penggunaan alat-alat bantu kerja, penggunaan mesin-mesin kerja, penggunaan bahan-bahan bangunan, pengerahan tenaga kerja, laporan keadaan cuaca dan lain sebagainya. Semua laporan tersebut supaya dibuat 4 (empat) ganda

Pasal 04 : DOKUMENTASI

- 4.1. Sebelum pekerjaan dimulai kegiatannya, maka keadaan lapangan atau tempat dimana pekerjaan akan dilaksanakan yang masih dalam keadaan fisik 0% atau keadaan yang masih asli sebelum proyek ada, supaya diambil gambar foto atau dipotret. Pemotretan supaya dipilih pada tempat-tempat yang dianggap penting menurut pertimbangan dan petunjuk Pengawas Teknis Lapangan
- 4.2. Pemborong diwajibkan membuat foto dokumentasi pada tahapan-tahapan pekerjaan fisik mencapai 0%, 50% dan 100%. Pengambilan foto proyek, supaya diusahakan pada tempat atau titik pemotretan yang tetap, sehingga nantinya akan tampak dan diketahui jelas perubahan-perubahan dan perkembangannya perkembangan yang terjadi selama terselenggaranya pelaksanaan proyek.
- Pengambilan foto proyek sekurang-kurangnya 4 (empat) buah titik, pada tempat atau posisi yang berbeda

Ukuran foto 9 x 13 cm berwarna atau ukuran kartu pos. Disamping itu pemborong juga harus membuat dan menyerahkan foto proyek ukuran 10R untuk keadaan fisik proyek 0% dan 100% masing-masing sebanyak 2 (dua) buah

4.3. Khusus untuk penyerahan pekerjaan pertama atau penyerahan pekerjaan yang telah mencapai fisik 100%, supaya dilampiri foto pemeriksaan pekerjaan oleh BPP (Badan Pengawas Pembangunan) pada Berita Acara pengajuan permohonan pembayaran angsuran

4.4. Semua foto dokumentasi proyek tersebut, supaya dimasukkan kedalam album khusus yang sudah disediakan dibuat 8 (delapan) bendel, 7 (tujuh) bendel untuk Dinas P dan K dan 1 (satu) bendel untuk arsip pemborong

Pasal 05 : CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

- 5.1. Pembayaran angsuran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
- 5.2. Tiap pengajuan pembayaran angsuran I, II, III, harus disertai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh BPP dan dilampiri Laporan Kemajuan Fisik Proyek, yang sudah ditandatangani oleh Pengawas Teknis Lapangan dan diketahui Koordinator Pengawas Teknis Lapangan
- 5.3. Tiap pengajuan pembayaran angsuran ke IV dan penyerahan pekerjaan pertama, harus disertai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan I, Daftar Hasil Opname Pekerjaan dan Foto-foto Proyek yang sudah dibendel sesuai dengan prestasi pekerjaan
- 5.4. Penilaian prestasi pekerjaan atas dasar pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tidak termasuk tersedianya bahan-bahan bangunan di lokasi atau tempat pekerjaan dan tidak atas dasar besarnya uang yang telah dikeluarkan oleh Pemborong
- 5.5. Pembayaran akan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.5.1. Angsuran pertama sebesar 20% dari harga borongan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 30%
 - 5.5.2. Angsuran kedua sebesar 25% dari harga borongan, dibayarkan setelah pekerjaan selesai 60%
 - 5.5.3. Angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan, dibayarkan setelah pekerjaan selesai 80% dan diserahkan untuk yang pertama kalinya oleh Pemborong
 - 5.5.4. Angsuran empat sebesar 25% dari harga borongan dibayarkan setelah pekerjaan 100 % diserahkan untuk yang pertama kalinya oleh Pemborong

5.5.5. Angsuran kelima atau angsuran terakhir sebesar 5% dan harga borongan dibayarkan setelah jangka waktu pemeliharaan selesai dan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya oleh Pemborong

5.6. Cara pembayaran angsuran bisa berlaku lain dari ketentuan yang tersebut pada Pasal 05.5.5. dan hal ini akan dicantumkan dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan

Pasal 06 : SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN / KONTRAK PEMBORONGAN

6.1. Pada pemberian pekerjaan ini, akan dibuat Surat Perjanjian Pemborong antara Pemberi Tugas dan Pemborong

6.2. Bea material Sural Perjanjian Pemborong menjadi beban dan tanggungan pihak Pemborong

6.3. Surat Perjanjian Pemborong ini dibuat sejumlah 13 (tiga belas) ganda

6.4. Konsep Surat Perjanjian Pemborong dibuat oleh Dinas dan biaya pembuatan buku kontrak, menjadi tanggungan dan beban pemborong

6.5. Buku kontrak pemborong berisi antara lain sebagai berikut:

- 6.5.1. Surat Perjanjian Pemborong
- 6.5.2. Surat Perintah Kerja atau SPK
- 6.5.3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemborong untuk melaksanakan pekerjaan
- 6.5.4. Surat Pengumuman Pemegang Lelang
- 6.5.5. Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
- 6.5.6. Surat Kelelahan Pemegang Pelelangan atau Penunjukan Langsung dari Kepala Daerah
- 6.5.7. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
- 6.5.8. Berita Acara Evaluasi atau Penetilan Harga Penawaran
- 6.5.9. Surat Undangan untuk mengikuti pelelangan
- 6.5.10. Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta gambar-gambar rencana beserta gambar-gambar penjelasannya
- 6.5.11. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya
- 6.5.12. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan pelelangan pekerjaan ini

Pasal 07 : WAKTU MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN

7.1. Setelah-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas, maka pelaksanaan pekerjaan dalam arti sebenarnya harus sudah dimulai kegiatannya

7.2. Bilamana ketentuan seperti tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Jaminan Pelaksanaan yang sudah diserahkan kepada Proyek dinyatakan hilang dan menjadi milik Pemerintah Daerah

7.3. Meskipun Jaminan Pelaksanaan sudah dinyatakan hilang, Pemborong tetap harus bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai

Pasal 08 : WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

8.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, termasuk hari Minggu, hari raya dan hari-hari hujan

8.2. Pekerjaan dapat diserahkan untuk yang pertama kalinya, apabila sudah benar-benar selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengawas Teknis Lapangan dan Pemberi Tugas dengan disertai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama dan ditempi Dallar Kemajuan Fisik Pekerjaan serta foto-foto proyek

8.3. Permintaan pemeriksaan pekerjaan untuk Penyerahan Pertama, diajukan kepada Pemberi Tugas, BPP dan Pengawas Teknis Lapangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sebelum tanggal penyerahan

Pasal 09 : MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

9.1. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah penyerahan pertama

9.2. Bilamana didalam masa pemeliharaan pekerjaan terjadi kerusakan-kerusakan akibat kurang sempurnanya pelaksanaan pekerjaan atau karena mutu bahan yang dipergunakan kurang baik, maka Pemborong harus segera memperbaiki dan menyempurnakannya, setelah pihak Pemborong diperlihatkan atau diberitahu oleh Pengawas Teknis Lapangan atau oleh Pengelola Proyek atau oleh Pemberi Tugas atau oleh Pemimpin Proyek baik secara lisan maupun secara tertulis

9.3. Pemborong masih mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul akibat mutu bahan bangunan yang dipergunakan kurang baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan kedua

Pasal 10 : PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN .

- 10.1. Surat Permintaan Perpanjangan Waktu Penyerahan Pekerjaan Pertama harus diajukan 15 (lima belas) hari, sebelum batas waktu penyerahan pekerjaan pertama berakhir dan Surat Permintaan Perpanjangan Waktu tersebut supaya dilampiri :

10.1.1. Data yang lengkap disertai alasan-alasan untuk bahan pertimbangan perlunya perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan pertama

10.1.2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan baru yang diperhitungkan lebih sempurna untuk penyelenggaraan pekerjaan selanjutnya

- 10.2. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang pertama, tanpa disertai dengan data pendukung yang lengkap dan alasan yang kuat, tidak akan dipertimbangkan

- 10.3. Permohonan Perpanjangan Waktu Penyerahan Pertama dapat diterima oleh Pemimpin Proyek bila :

10.3.1. Adanya pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang yang tidak dapat dielakkan lagi, setelah atau sesudah kontrak perjanjian pemborongan ditandatangani

10.3.2. Adanya Surat Perintah tertulis dari Pemimpin Proyek, bahwa pekerjaan untuk sementara waktu supaya dihentikan

10.3.3. Adanya Surat Perintah tertulis dari Pemimpin Proyek, tentang pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang

10.3.4. Pekerjaan tidak bisa dimulai tepat pada waktunya karena adanya masalah tanah yang akan dipergunakan untuk pekerjaan atau bangunan belum bisa dibebaskan atau diselesaikan atau karena adanya hal lain di luar kemampuan pemborong

10.3.5. Adanya gangguan hujan yang terus menerus ditempat pekerjaan dan daerah sekitarnya yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya hal yang demikian, maka Laporan Data Curah Hujan yang dibuat, supaya dilampirkan dalam Surat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu

Pasal 11 : DENDA

- 11.1. Menyimpang dari Pasal 49 A.V. bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama kali dilampai atau tidak bisa dipenuhi oleh Pemborong, maka kepada Pemborong akan dikenakan sanksi denda sebesar 2/1000 (dua per seribu) sehari sampai sebanyak-banyaknya 5% dari nilai harga kontrak borongan

- 11.2. Menyimpang dari Pasal 49 A.V. terhadap segala kelalaian mengenai peraturan atau tugas yang tercantum dalam rencana

kerja dan syarat-syarat ini, maka sepanjang dalam RKS ini tidak ada ketentuan mengenai denda lainnya, maka Pemborong dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai harga kontrak untuk setiap kali kelalaian setelah diberi teguran secara tertulis sampai sebanyak 3 (tiga) kali

- 11.3. Apabila ada perintah untuk mengerjakan pekerjaan tambah dan tidak disebabkan jangka waktu pelaksanaan tidak akan diperpanjang.

Pasal 12 : PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

- 12.1. Pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang hanya dapat dilaksanakan oleh Pemborong atas perintah tertulis dari Pemberi Tugas atau Pemimpin Proyek

- 12.2. Sebelum pekerjaan tambah dikerjakan oleh Pemborong maka Pemborong supaya mengajukan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan tambah kepada Pemimpin Proyek, agar Pemimpin Proyek dapat memperkirakan apakah pekerjaan tambah tersebut dapat terbayar atau tidak

- 12.3. Didalam mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Tambah maka pada Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan, supaya sudah dimasukkan keuntungan pemborong 10% dan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai 10%

- 12.4. Perhitungan pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang didasarkan pada harga satuan pekerjaan pemborong yang telah dimasukkan dalam harga penawaran atau kontrak

- 12.5. Bilamana harga satuan pekerjaan, belum tercantum dalam surat penawaran yang diajukan, maka hal ini akan diselesaikan secara musyawarah atau negosiasi

Pasal 13 : PENCABUTAN PEKERJAAN

- 13.1 Sesuai dengan A.V Sub 3b maka Pemimpin Proyek berhak membatalakan atau mencabut pekerjaan dari lapangan Pemborong, apabila ternyata pihak pemborong telah menyerahkan pekerjaan keseluruhan atau sebagian pekerjaan kepada Pemborong lain, semata-mata hanya mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut

- 13.2. Pada pencabutan pekerjaan pemborongan yang dapat dibayarkan kepada pemborong :

13.2.1. Hanya pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan telah selesai diopname serta disetujui oleh Pemimpin Proyek, sedang harga bahan-bahan bangunan yang berada pada tempat atau lokasi pekerjaan, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab Pemborong sendiri

13.2.2. Bilamana sisa uang pekerjaan dipandang atau menurut perhitungan Pemimpin Proyek tidak cukup banyak, maka Pemborong harus menunggu penyelesaian pekerjaan tersebut oleh pemborong lain sampai pekerjaan selesai 100% serta sudah dapat diterima baik oleh Pemimpin Proyek.

13.3 Meskipun sebagian dari pekerjaan tersebut telah diserahkan kepada Pemborong lain, maka seluruh pekerjaan masih tetap menjadi tanggungjawab Pemborong utama (main contractor)

Pasal 14 : PERSELISIHAN

Perselisihan yang melalui bersifat teknis akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pemberi tugas dan direksi, seorang wakil pemborong dan seorang lagi yang dipilih oleh kedua wakil tersebut diatas. Keputusan-keputusan panitia tersebut mengikat untuk kedua belah pihak. Perselisihan - perselisihan lainnya yang bersifat umum atau bersifat hukum akan diajukan dan diselesaikan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Negeri

Pasal 15 : PEMBAYARAN UANG MUKA

15.1 Pembayaran uang muka selinggi-lingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Pemborong atau Kontrak -

15.2. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Pemborong menyerahkan jaminan yang muka yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah atau Bank lain atau Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh menteri Keuangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 551.1/37203, tanggal 19 Oktober 1991, maka untuk mendapatkan uang muka tersebut harus ada Bank Garansi dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nilai Surat Jaminan Bank tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan proyek yang diberikan

15.3 Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 15.1. dapat dipertanggung berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran angsuran, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborong atau kontrak dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen) atau pada waktu penyerahan pekerjaan bersama.

Pasal 16 : KERJASAMA DENGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH

Apabila dalam pemborong atau pembelian yang terpilih adalah pemborong atau rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah maka :

16.1. Pemborong atau rekanan tersebut wajib bekerja sama dengan pemborong atau rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain sebagai sub kontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa

16.2. Dalam melaksanakan pasal 16 ayat 1. tersebut maka Pemborong atau rekanan yang terpilih tetap bertanggungjawab atas selesainya seluruh pekerjaan tersebut.

16.3. Bentuk kerjasama tersebut adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensub kontrakkan seluruh pekerjaan tersebut.

16.4. Pemborong atau rekanan golongan ekonomi kuat yang terpilih, harus membuat Laporan Periode mengenai pelaksanaan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam bulir 16.1. termasuk pelaksanaan pembayarannya dan disampaikan kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan

16.5. Apabila Pemborong atau rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. s/d 16.3. maka disamping kontrak akan batal, Pemborong atau rekanan bersangkutan akan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu atau DRM

Pasal 17 : KERJASAMA OPERASIONAL DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)

Pemborong diharuskan bekerjasama dengan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) terrekommendasi dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO).

Nomor :
Lampiran : 5 (lima) ganda
Perihal : Surat Penawaran

Kepada
Pemerintah Kolamadya Daerah Tk II
Semarang
di -
Semarang

Untuk pelelangan terbalas yang diadakan pada :

Hari/tanggal/jam :
Tempat :
Untuk pekerjaan :

Yang berlandaskan dibawah ini :

1. Nama Direktur/Pimpinan :
2. Jabatan :
3. Alamat rumah Direktur :
4. Alamat perusahaan :

Dengan ini menyatakan :

1. Akan lunduk pada Pedoman Pelelangan terbalas untuk pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi SD-MI.
2. Memilih sebagai tempat kedudukan yang telep pada kantor Panitia dari Pengaditan Negeri Semarang.
3. Mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Dokumen Pelelangan Terbalas dan perubahan-perubahan atau tambahan-lambahan yang tercantum dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang diadakan pada tanggal
4. Mempertihkan pekerjaan lambah atau pekerjaan kurang yang mungkin ada atas dasar Rencana Kerja dan Syarat-syarat atau Bestek
5. Penawaran tersebut mengikat sampai pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak
6. Sanggup dan bersedia melaksanakan, mendatangkan segala bahan-bahan bangunan dan peralatan kerja yang diperlukan untuk :
 - a) Pekerjaan :
 - b) Dengan harga borongan : Rp.
 - c) Dengan huruf :
 - d) Jangka waktu pelaks. selama (..) hari kalender
 - e) Pekerjaan dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sesudah Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Pimpinan Proyek

Semarang,
Yang menawar
PT./CV.
tanda tangan
Direktur

Keterangan :
Surat penawaran yang asli
bermaterai Rp. 2.000,-

Pasal 01 : PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1.1. Tempat pekerjaan diserahkan kepada Pemborong dalam keadaan seperti pada waktu Pemberian Penjelasan pekerjaan
- 1.2. Pemborong supaya membuat bangunan sementara untuk keperluan Kantor Direksi; Kantor Kerja Pelaksanaan dan Gudang yang dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan bangunan dan peralatan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.2.1. Ukuran bangunan sementara tersebut, sekurang-kurangnya berukuran 3 x 6 m²
 - 1.2.2. Biaya pembuatan bangunan sementara tersebut tidak boleh diperlihatkan dalam penawaran atau RAB
 - 1.2.3. Pembuatan dan penempatannya supaya seizin Pengawas Teknis Lapangan
 - 1.2.4. Bangunan sementara tersebut harus dilamin akan fungsi dan kaahannya serta harus cukup kuat
 - 1.2.5. Konstruksi bangunan sementara tersebut sekurang-kurangnya dibuat dari kayu Kalimantan; dinding tripleks; alas seng gelombang dan lantai plesteran
- 1.2.6. Pada bangunan sementara tersebut, yaitu pada Kantor Direksi supaya dilengkapi dengan 1 (satu) meja 1/2 biro dan 2 (dua) buah kursi yang pantas; gambar-gambar kerja; jadwal waktu pelaksanaan; kotak PPK; kalender; buku direksi ukuran folio; buku lama, buku penitmanan bahan-bahan dan sebagainya Disamping itu juga harus tersedia bestek atau RKS lengkap dengan gambarnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
- 1.2.7. Bangunan sementara tersebut setelah proyek selesai menjadi milik pemborong, karena itu bangunan sementara tersebut, setelah selesai kegunaannya harus segera disingkirkan atau dibongkar dan lokasinya di bersihkan kembali seperti semula oleh pemborong.
- 1.2.8. Pemborong harus segera memasang Papan Nama Pengenal Proyek di lokasi pekerjaan yang ukuran maupun isinya tersebut dalam Bab I pasal 23 ayat 6 Pemusangan Papan Nama Pengenal Proyek tersebut, supaya diusahakan sedini mungkin sebelum pekerjaan fisik dimulai dan Papan Nama Pengenal tersebut supaya di pasang pada tempat yang mudah dilihat umum atau dipasang sesuai dengan petunjuk yang akan diberikan oleh pengawas teknis lapangan.

- 1.2.9. Pemborong Sebelum mulai dan sesudah selesai pelaksanaan pekerjaan harus melapor kepada Pemuka Wilayah Setempat yaitu Lurah, Camat, Cabang Dinas P dan K Kecamatan yang bersangkutan.

PASAL 02 : PEKERJAAN TANAH

A. Lingkup Pekerjaan.

1. Pekerjaan galian tanah .
Yang termasuk pekerjaan galian tanah diantaranya adalah :
 - 1.1. Pekerjaan galian tanah untuk semua macam pondasi, baik yang berupa pondasi untuk bangunan rumah; pondasi untuk bangunan gedung; pondasi pagar halaman dan pondasi bangunan-bangunan lainnya.
 - 1.2. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya memerlukan pekerjaan galian tanah atau di dalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan galian tanah.
2. Pekerjaan Urugan Tanah
Yang termasuk pekerjaan urugan tanah tanah adalah :
 - 2.1. Pekerjaan urugan tanah kembali, baik untuk bagian dalam maupun untuk bagian luar pondasi bangunan rumah atau gedung. Dan juga untuk bagian dalam dan luar pondasi bangunan-bangunan lainnya.
 - 2.2. Pekerjaan urugan tanah untuk peninggian lantai bangunan.
 - 2.3. Pekerjaan urugan pasir untuk bagian bawah pondasi; bagian bawah saluran pasangan; bagian bawah bangunan got; bagian bawah pasangan gorong-gorong serta pada bagian pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menurut sifat pekerjaannya memerlukan pekerjaan urugan pasir atau yang pada Gambar Rencana dinyatakan dengan pekerjaan urugan pasir.
 - 2.4. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya memerlukan pekerjaan urugan tanah atau yang pada Gambar Rencana atau didalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan urugan tanah, baik berupa pekerjaan urugan tanah biasa; pekerjaan urugan tanah padas; pekerjaan urugan tanah sirtu maupun pekerjaan urugan tanah lainnya.

3. Pekerjaan Pemadatan

- Yang termasuk pekerjaan pemadatan, diantaranya adalah

- 3.1. Pekerjaan pemadatan tanah urugan, baik urugan tanah biasa, urugan tanah sirtu, urugan tanah padas, maupun urugan tanah lain baik yang berada dalam bangunan maupun di luar bangunan .

- 3.2. Pekerjaan Pemadatan urugan pasir atau urugan sirtu atau urugan tanah padas pada bagian bawah pekerjaan jalan
- 3.3. Pekerjaan-pekerjaan tanah lain yang menurut sifat pekerjaannya, diperlukan pekerjaan pemadatan atau yang menurut penilaian Direksi diperlukan pekerjaan pemadatan.

B. Persyaratan Umum

1. Lapisan humus atau tanah yang strukturnya jelek yang terdapat pada lokasi rencana bangunan atau pekerjaan yang ada, supaya disingkirkan sehingga pondasi bangunan benar-benar berpijak pada yang keras dan mantap yang tidak mengandung humus atau sampah.
2. Untuk keperluan pekerjaan pondasi, harus dilakukan penggalian tanah sekurang-kurangnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang tercantum pada Gambar Rencana
3. Tanah yang dipergunakan untuk pekerjaan urugan atau timbunan, harus tanah yang bersih dari humus, akar-akar tanaman dan kotoran-kotoran lainnya dan untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Koordinator Pengawas dan Tenaga Pengawas Lapangan.
4. Pekerjaan penimbunan tanah, peninggian tanah ataupun pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian supaya dipadatkan sebaiknya
5. Selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan pekerjaan, Pemborong supaya mengadakan tindakan pencegahan, baik terhadap genangan air atau arus air yang dapat menyebabkan erosi
6. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pemborong harus mencegah terjadinya kerusakan semua sarana umum yang masih digunakan seperti saluran-saluran air, instalasi listrik; telkom; gas; pipa air minum; jalan dan lain sebagainya yang dijumpai di sekitar lokasi proyek. Bila sampai terjadi cedera atau kerusakan pada sarana tersebut diatas, karena kekeliruan dan kurang hati-hati dalam pelaksanaan pekerjaan, maka Pemborong harus memperbaiki kembali seperti keadaan semula sebagai resiko pekerjaan pemborongan ini.

C. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan Galian Tanah

- 1.1. Pekerjaan galian tanah untuk semua lubang, batu oleh dilaksanakan setelah papan bangunan dipasang atau palok-palok diletakkan dan poli-poli atau tlik duga telah ditentukan berikut pemburuan sumbu-sumbu bangunan dan sudah diperiksa kebenarannya oleh Pengawas Teknis Lapangan. Persetujuan pelaksanaan pekerjaan galian tanah oleh

Pengawas Teknis Lapangan harus dinyatakan secara tertulis dalam Buku Direksi

- 1.2. Terhadap kemungkinan berkumpunya air dalam galian tanah yang dibuat, terutama pada galian-galian tanah yang agak dalam, baik pada saat penggalian tanah dilakukan maupun pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka Pemborong supaya mengeluarkan air yang mengganggu tersebut dari galian sehingga galian tanah benar-benar dalam keadaan kering dan pekerjaan pasangan maupun pekerjaan pondasi, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bilamana Pemborong harus menyediakan pompa air yang cukup, baik kapasitas sedotnya maupun jumlahnya dan jika diperlukan pompa air tersebut dapat bekerja terus-menerus. Pembuangan air tidak boleh mencemari lingkungan sekitarnya

- 1.3. Semua bekas tanah galian yang sudah tidak diperlukan lagi dan akan mengganggu lalu lintas, serta mengganggu dan mencemari lingkungan sekitarnya, maka Pemborong harus segera menyingkirkannya dari lokasi pekerjaan atas tanggungan biaya Pemborong sendiri

- 1.4. Datangnya galian tanah untuk pondasi, harus mencapai tanah yang keras dan sekurang-kurangnya harus sesuai dengan ukuran pada Gambar Rencana, sebagai pedoman kedalaman galian pondasi

Jika kualitas atau struktur tanah untuk pondasi ternyata kurang baik, maka Pemborong harus melakukan penggalian tanah lebih dan apa yang telah ditetapkan untuk mencapai tanah keras atau Pemborong harus bersedia mengadakan usaha perbaikan tanah misalnya dengan urugan pasir yang dipadatkan lapis demi lapis sampai mencapai peli yang telah ditentukan. Perbaikan tanah bisa juga menggunakan bahan lain, yang akan ditetapkan bersama. Untuk semua pekerjaan tambahan yang timbul tersebut, sepenuhnya menjadi beban Pemborong atau akan diadakan negosiasi, bila pekerjaan tambahan tersebut ternyata memerlukan biaya yang cukup besar.

2. Pekerjaan Urugan Tanah

- 2.1. Pekerjaan urugan tanah, baik berupa pekerjaan urugan tanah kembali maupun urugan pasir ataupun urugan tanah lain, harus dilaksanakan lapis demi lapis dengan ketebalan setiap lapis tidak boleh lebih dari 20 cm, sambil dipadatkan baik dengan alat pemadat non mekanis maupun dengan alat pemadat mekanis. Untuk urugan tanah yang sifatnya konstruktif, pemadatan harus memakai alat pemadat mekanis

- 2.2. Pekerjaan urugan pasir pasang, baik dibawah pasangan pondasi maupun dibawah pekerjaan pasangan saluran dan pekerjaan pasangan lainnya, ketebalannya harus sesuai dengan ukuran yang tercantum pada gambar bestek

- 2.3. Urugan pasir pasang dilaksanakan pada bagian-bagian yang menurut ketentuan teknis, harus memakai pasir pasang atau yang pada gambar rencana disebutkan memakai pasir pasang misalnya pada bagian bawah pasangan pondasi; pada bagian pasangan lantai dan lain sebagainya

- 2.4. Tanah asli atau tanah sirtu atau pasir yang dipergunakan untuk pekerjaan urugan pada pekerjaan ini harus tanah yang bersih dari segala kotoran, sampah ataupun bahan-bahan organik

- 2.5. Tanah lembek atau tanah lempung atau tanah jelek sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk pekerjaan urugan

3. Pekerjaan Pemadatan

- 3.1. Pekerjaan pemadatan tanah harus dilaksanakan sebaik-baiknya, bilamana perlu dibuat air secukupnya untuk membantu proses pemadatan

- 3.2. Tanah urugan baik tanah asli, tanah padas maupun sirtu, jika dipandang perlu oleh Tenaga Pengawas Lapangan juga harus dipadatkan sebaik-baiknya dengan alat-alat pemadat mekanis seperti misalnya Compactor; Mechanical Rammer atau dengan Alat-alat Pemadat lain sejenisnya

Pasal 03 : PEKERJAAN PASANGAN

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan pasangan antara lain meliputi :

1. Pekerjaan pemasangan batu belah untuk pondasi
2. Pekerjaan pemasangan batu bata untuk dinding bangunan
3. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya harus dibuat dari pasangan batu belah atau yang pada gambar rencana diunjuk sebagai pasangan batu belah
4. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya harus dibuat dari pasangan batu bata atau yang pada gambar rencana, diunjuk sebagai pekerjaan pasangan batu bata

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan pasangan pada umumnya

- 1.1. Semua pekerjaan pasangan, baik untuk pekerjaan pasangan pondasi maupun untuk pekerjaan pasangan lainnya baru boleh dilaksanakan bilamana galian tanah tersebut sudah diperiksa, baik kedalaman maupun ukurannya oleh Tenaga Pengawas Lapangan (TPL), pemasangan sudah diizinkan secara tertulis (dalam Buku Direksi)

- 1.2. Untuk pekerjaan pasangan yang bersifat konstruktif, sebelum pekerjaan pasangan dilaksanakan, maka galian tanah tersebut harus diperiksa dulu struktur tanahnya oleh Koordinator Tenaga Pengawas Lapangan dan untuk pemasangan pekerjaan pasangan tersebut, harus ada izin

tertulis (dalam Buku Direksi) dari Koordinator Tenaga Pengawas Lapangan

- 1.3. Jika pada lubang-lubang galian tanah tersebut terdapat air genangan, maka sebelum pekerjaan pemasangan dilaksanakan air yang ada pada galian tanah tersebut supaya dikeluarkan dulu, sehingga pekerjaan pemasangan dapat dikerjakan dalam keadaan kering
 - 1.4. Jika pada lubang-lubang galian tanah tersebut terdapat akar-akaran tanaman, maka akar-akaran tanaman ini juga harus dibersihkan
 - 1.5. Jika keadaan tanah atau struktur tanah yang digali ternyata kurang baik dan dipandang perlu ada perbaikan tanah, maka Pemborong harus bersedia melaksanakan pekerjaan perbaikan tanah tersebut tanpa ada tuntutan tambahan biaya, sepanjang nilai biayanya tidak terlalu besar
2. Pekerjaan pemasangan batu belah
- 2.1. Pekerjaan pemasangan yang dalam pekerjaan ini dinyatakan dengan pekerjaan pemasangan batu belah seperti misalnya untuk pekerjaan pondasi, pekerjaan pasang talud pekerjaan
 - 2.2. Rongga-rongga atau celah-celah yang ada pada pemasangan batu belah supaya diisi dengan pasak dari batu belah ukuran kecil disamping adukan perekat, sehingga pemasangan tersebut benar-benar pejal atau padat
 - 2.3. Adukan perekat yang dipergunakan untuk pekerjaan ini ialah 1 PC + 5 pasir, atau menggunakan campuran adukan lain seperti apa yang tercantum pada gambar beslek atau RAB. Atau seperti yang akan ditetapkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
 - 2.4. Sisi-sisi pemasangan batu belah yang nantinya akan diurutkan tanah kembali supaya dirap atau diberiben yang baik, dengan campuran adukan sama dengan campuran adukan pasangannya
 - 2.5. Adukan perekat harus membungkus seluruh permukaan batu sehingga pasangan tidak akan ada yang keropos atau berongga
 - 2.6. Semen yang dipergunakan untuk pekerjaan pemasangan ini ialah semen Nusantara atau semen cap Tiga Roda yang masih baru dan belum ada tanda-tanda proses mengeras. Sedang untuk pasir pasangannya menggunakan pasir Muntilan
 - 2.7. Pengadukan semua perekat, harus menggunakan mesin pengaduk campuran atau mixer dan sama sekali tidak dibenarkan dilakukan dengan cangkul, sekop atau dengan alat-alat lain sejenisnya

3. Pekerjaan pemasangan batu bata

- 3.1. Pekerjaan pemasangan batu bata atau yang pada gambar rencana pekerjaan ini dinyatakan dengan pekerjaan ini dinyatakan dengan pekerjaan pemasangan batu bata, misalnya untuk dinding bangunan, pembuatan sepih, pembuatan bak kontrol, pembuatan pagar halaman, pembuatan bukit jalan masuk dan lain sebagainya
- 3.2. Campuran adukan 1 PC + 4 pasir dipergunakan untuk :
 - 3.2.1. Pekerjaan pemasangan dinding bangunan jadi atas permukaan sloof sampai selinggi 50 cm diatas lantai bangunan
- 3.3. Pasangan batu bata dengan perekat 1 PC + 5 pasir dipergunakan pada :
 - 3.3.1. Pasangan gulung atau rollag-rollag diatas kusen baik kusen pintu atau kusen jendela dengan bentang kurang dari 1,00 meter
- 3.4. Pasangan dinding batu bata dengan perekat 1 PC + 5 pasir dipergunakan pada semua pasangan dinding batu bata selain yang tersebut pada butir 3.2. dan 3.3.. Atau menggunakan campuran adukan lain sesuai dengan yang diminta pada RAB atau gambar rencana
- 3.5. Contoh batu bata yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini, supaya diunjukkan dulu pada Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) untuk mendapatkan persetujuan pemakaian. Batu bata yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini, harus batu bata berkualitas baik tidak banyak yang pecah, tidak rapuh dan berisi tajam
- 3.6. Batu bata sebelum dipasang, supaya direndam atau disiram dulu dengan air, sampai kembang atau jenuh
- 3.7. Pasir pasang yang dipergunakan untuk pekerjaan pemasangan ini ialah pasir muntilan, sedang untuk semennya menggunakan semen Nusantara atau semen cap Tiga Roda
- 3.8. Pekerjaan pemasangan batu bata harus rejin dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis pemasangan batu bata
- 3.9. Pemasangan batu bata untuk dinding bangunan, supaya dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahap tidak boleh lebih dari 1,00 meter, selanjutnya diikuti dengan perkuatan cor kolom praktis. Selanjutnya ditunggu sampai pasangan ini kuat betul minimal 1 hari baru bisa dilaksanakan pemasangan batu bata berikutnya

Pasal 04 : PEKERJAAN BETON

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan beton, antara lain meliputi :

1. Semua pekerjaan beton tidak bertulang diantaranya untuk :
 - 1.1. Kaki kusen atau umpak dengan campuran 1PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah
 - 1.2. Pengisi lubang angkur atau pembungkus angkur dengan campuran 1PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah
 - 1.3. Lantai kerja dengan campuran 1 PC + 3 pasir beton + 5 batu pecah atau dilentukan lain sesuai dengan yang tercantum pada Gambar Rencana atau RAB

2. Semua pekerjaan beton bertulang diantaranya untuk :

- 2.1. Pekerjaan struktur bangunan misalnya untuk pondasi plat kaki, kolom, sloof, balok lingkar, balok konsol, balok struktur, balok lantai, plat lantai, tangga dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang tercantum pada Gambar Rencana dan RAB
- 2.2. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat konstruksinya menggunakan beton bertulang atau yang pada gambar rencana dinyatakan dengan pekerjaan beton bertulang

B. Persyaratan Umum

1. Semua syarat bahan maupun pelaksanaan pekerjaan beton bertulang, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971
2. Semua pekerjaan beton bertulang menggunakan campuran 1 PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah atau ditentukan dengan campuran lain, sesuai yang tercantum pada gambar rencana atau RAB
3. Mutu beton harus memenuhi minimal syarat K.175 atau sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian
4. Mutu besi beton harus memenuhi syarat U.24

5. Besi beton yang dipergunakan harus besi baru, bebas dari banyak lekukan, karat besi yang mudah terkelupas dan kotoran lain yang mengurangi daya lekat beton

C. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Semua ukuran yang tertera pada pekerjaan beton dalam gambar rencana adalah ukuran dalam dari kayu cetakan atau form work
2. Cetakan beton harus datar dan lurus tidak boleh bocor dan cukup kokoh sehingga tidak akan terjadi perubahan bentuk beton yang dibuat, baik pada waktu pengecoran maupun sesudahnya

3. Pemasangan tulangan besi tidak boleh sampai menyentuh papan kayu cetakan dengan menyentu rollag atau pasangan batu bata diatas pondasi
4. Untuk menjaga selimut beton, maka pada tulangan besi yang dipasang, supaya diberi penyangga kotak-kotak beton kecil yang dilengkapi kawat pengikat atau bisa juga menggunakan cara lain yaitu dengan memasang besi cakar ayam, yang dipergunakan sebagai pengatur jarak antara besi penulangan dengan sisi beton yang tertuang, dengan tebal atau linggi sesuai dengan macam konstruksinya. Pemasangan kotak-kotak beton kecil atau besi cakar ayam tersebut harus dalam jumlah yang cukup sehingga besi beton yang dirakit tidak melentur
5. Campuran beton harus diaduk dengan mesin pengaduk beton atau concrete mixture dan sama sekali tidak boleh dilakukan dengan cangkul, sekop atau dengan alat-alat lain sejenisnya. Pada waktu pelaksanaan pengecoran, supaya dipadatkan dengan alat penggetar beton atau concrete vibrator
6. Sebelum pengecoran beton dilaksanakan pada sisi bagian dalam kayu cetakan atau kayu acuan, supaya disiram air dulu sampai jatuh dan bagian dalam kayu cetakan beton tersebut harus bebas dari segala kotoran
7. Izin pengecoran hanya bisa diberikan oleh Perencana dan perhitungannya supaya diajukan minimal dalam waktu 2 x 24 jam secara tertulis, setelah semua pekerjaan perakitan penulangan besi selesai dan persiapan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan siap untuk dilakukan pengecoran
8. Setelah 24 jam pelaksanaan pengecoran beton selesai, maka beton yang sudah jadi tersebut harus selalu dirawat dengan jalan dibasahi atau disiram air selama proses pengerasan dan pengikatan beton berlangsung kira-kira selama 28 hari
9. Ukuran-ukuran atau dimensi dari bagian-bagian pekerjaan konstruksi beton bertulang yang terdapat pada gambar rencana, supaya diikuti dengan seksama. Demikian juga ukuran-ukuran besi penulangan yang ditetapkan dalam gambar-gambar struktur konstruksi beton bertulang yang ada.
10. Jika karena sesuatu hal atau karena keadaan dipasaran, besi penulangan yang diperlukan untuk pekerjaan ini tidak ada dan untuk itu perlu diganti dengan besi penulangan berukuran diameter lain guna kelangsungan pelaksanaan pekerjaan, maka jumlah luas penampang besi penulangan pengganti tidak boleh berkurang dari luas penampang besi penulangan semula

Dalam hal penggantian penampang penulangan besi, supaya konsultasi dengan Perencana dan persetujuan hanya bisa diberikan oleh perencana

11. Sebelum beton mencapai tagangan yang diharapkan maka pada beton yang sudah jadi tidak boleh dilakukan perbaikan-perbaikan berat, pemukulan-pemukulan ataupun dibebani
12. Pengcoran beton harus dilakukan dengan air bersih, tidak asin, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak beton dan untuk penggunaan air kerja ini, harus ada persetujuan lebih dulu secara tertulis dari Tenaga Pengawas Lapangan (TPL)

Pasal 05 : PEKERJAAN KAYU

A. Lingkup Pekerjaan Kayu Antara Lain Meliputi :

1. Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan kusen-kusen, baik kusen pintu, kusen jendela, kusen penerangan atas dan lain sebagainya
2. Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan daun pintu, baik daun pintu kaca, daun pintu krepak, daun pintu panil, dsb.
3. Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan daun jendela baik daun jendela kaca, daun jendela krepak, daun jendela panil dan lain sebagainya
4. Pekerjaan pemasangan dan penyetelan semua perlengkapan daun pintu dan daun jendela
5. Pekerjaan pembuatan konsol kayu Bengkirai
6. Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan jendela kaca krepak dan penerangan atas serta kaca mati

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan Kusen
 - 1.1. Pekerjaan pembuatan kusen, baik kusen pintu, kusen jendela, kusen penerangan atas, daun pintu maupun daun jendela dan lain sebagainya harus memenuhi semua persyaratan teknik konstruksi kayu atau PKKI yaitu Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
 - 1.2. Untuk semua pekerjaan kusen, rangka daun jendela atau daun pintu, rangka dinding dan lain sebagainya, menggunakan bahan kayu Bengkirai kecuali ditetapkan dalam RAB atau yang akan ditetapkan kemudian pada waktu pemberian penjelasan pekerjaan
 - 1.3. Kayu yang dipergunakan untuk pembuatan kusen, rangka daun jendela atau daun pintu dan lain sebagainya harus jenis kayu pilihan yang berkualitas baik, kering udara, tidak cacat baik berubang atau pecah atau bermata. Bahan kayu tidak boleh melengkung atau melentur dan harus berukuran seragam

- 1.4. Kusen, rangka daun pintu dan jendela dan pekerjaan-pekerjaan kayu lainnya, tidak boleh dimeni sebelum diperiksa dan mendapat izin dari TPL
- 1.5. TPL berhak untuk menolak dan memerintahkan penggantian pekerjaan kayu diatas, bilamana pekerjaan atau mutu kayu yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan. Urutan kayu yang dipakai tidak sesuai dengan ketelitian, uraian dan syarat-syarat teknik serta gambar rencana yang ada
- 1.6. Setiap kusen yang berhubungan dengan dinding bangunan atau kolom, harus diberi angkur besi. Untuk kusen pintu minimal dipasang sebanyak 6 buah, sedang untuk kusen jendela minimal dipasang sebanyak 4 buah
- 1.7. Ukuran kusen adalah 6/15 atau ditentukan lain sesuai dengan ukuran yang tercantum pada gambar rencana atau yang disebutkan dalam RAB
- 1.8. Sedang untuk ukuran pekerjaan kayu lainnya, bisa dilihat pada gambar penjeles pada gambar rencana
- 1.9. Semua kusen, baik kusen pintu maupun kusen jendela, juga komponen-komponen pekerjaan kayu lainnya yang sudah dipasang, supaya dilindungi terhadap benturan dengan barang lain atau benda lain, supaya sudut-sudutnya tidak rusak, baik selama penyetelan maupun sesudahnya
- 1.10. Semua kusen baik kusen pintu, kusen jendela maupun kusen lainnya seperti kusen jendela penerangan atas, harus dipasang tegak lurus dan dalam keadaan atau kedudukan rata air.
- 1.11. Bagian - bagian kusen yang bakal tertanam atau yang akan berhubungan langsung dengan pasangan tembok dan juga pada bagian sambungan sambungan kayu sebelum diterapakan atau dipasang harus dimani dulu sampai minimal dua kali
- 1.12. Datas semua kusen dengan bentang lebih 1,00 meter supaya dipasang balok lantai beton bertulang 1 PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah dengan besi penulangan 4 ϕ 10 mm dan sengkang ϕ 6 mm - 20 cm
2. Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan daun pintu dan daun jendela
 - 2.1. Semua rangka daun pintu atau daun jendela menggunakan bahan kayu Bengkirai kecuali ditetapkan menggunakan bahan kayu jenis lain sesuai dengan yang diminta pada gambar rencana dan RAB
 - 2.2. Semua rangka daun pintu menggunakan bahan kayu kamfer, kemudian dilutur dengan panil baik pada bagian muka maupun pada bagian belakangnya

2.3. Pemasangan daun pintu atau jendela harus tepat dengan ukuran kusennya sehingga daun pintu maupun daun jendela bisa menutup baik dan rapat

2.4. Pembuatan pintu panil atau pintu krepyak, demikian juga daun jendela panil atau jendela krepyak harus sesuai dengan gambar penjelasan pada gambar rencana

2.5. Pembuatan pintu atau jendela panil, harus sesuai dengan gambar rencana

3. Pekerjaan pemasangan dan penyetelean semua perlengkapan daun pintu dan daun jendela

3.1. Pada tiap daun pintu dan daun jendela, minimal dipasang dua buah engsel, kualitas baik. Untuk daun pintu yang lebar dan berat, jumlah engsel yang dipasang upaya ditambah satu dan dipasang dibagian tengah

3.2. Engsel yang dipakai engsel jenis H, yaitu engsel nylon setara merk ARCH, yang dipasang dengan menggunakan sekrup kembang

Contoh engsel yang akan dipakai harus ditunjukkan dulu pada Direksi untuk mendapatkan persetujuan pemakaian

3.3. Pintu supaya dilengkapi dengan kunci tanam pintu, kualitas baik, setara mutunya dengan cap kuda terbang, cap jangkak atau akan ditentukan dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan. Kunci tanam tersebut adalah kunci tanam dengan dua kali putar berikut pegangan penarikannya

Untuk kunci tanam yang akan dipakai supaya ditunjukkan dulu contoh barangnya kepada Direksi, sebelum digunakan untuk mendapatkan persetujuan pemakaian

3.4. Perlengkapan daun pintu dan daun jendela supaya dienuhi dengan sebaik-baiknya seperti grendel, kait angin dan lain sebagainya

Pada pintu kamar mandi/WC, supaya diberi grendel pada bagian dalam

4. Pekerjaan pembuatan, penyetelean dan pemasangan jendela kaca krepyak dan penerangan atas serta kaca mali

4.1. Pemasangan kaca, baik kaca mali ataupun kaca krepyak harus cukup kuat, rapat dan rapi serta tidak goyang. Pemasangan kaca supaya memperhatikan kelonggaran yang cukup untuk memberi kesempatan pemuaian dan susut

4.2. Cacat pada bahan kaca sebelum dan sesudah pemasangan seperti pecah pinggirnya, retak dan bergelombang akan ditolak

4.3. Tebal kaca naco 5 mm. Demikian juga jenis kaca rayban. Sedang kaca bening dengan luas bidang lebih dari 1 meter persegi menggunakan tebal 5 mm. Untuk kaca krepyak menggunakan tebal 5 mm.

Pasal 06 : PEKERJAAN KAP KAYU DAN PENUTUP ATAP

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan kap kayu dan penutup atap, antara lain meliputi :

1. Pekerjaan kap kayu dan semua perlengkapannya
2. Pekerjaan penutup atap untuk seluruh bangunan
3. Pekerjaan-pekerjaan lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan kap dan penutup atap

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kuda-kuda kap dibuat dari kayu Bengkiral atau sesuai dengan yang tercantum dalam RAB

2. Kayu yang akan dipergunakan untuk kap harus kayu yang berkualitas baik, yaitu kayu yang benar-benar kering udara, tidak melentur, tidak cacat seperti belubang, rapuh, pecah dan lain sebagainya

3. Ukuran kayu untuk kuda-kuda, gording, balok tarik, balok tekan, konsol dan lain sebagainya harus sesuai dengan ukuran yang diminta pada gambar rencana dan RAB. Termasuk juga pada pekerjaan ini yaitu pengawetan kayu usuk, reng dan lain sebagainya.

4. Setelah kap kayu terpasang, maka semua harus segera ditir atau dicat dengan bahan pengawet kayu seperti LENTREK 400 EC, sesuai yang tercantum dalam RAB

Termasuk juga pada pekerjaan ini yaitu pengawetan kayu usuk, reng dan lain sebagainya. Pengecalan kayu harus sampai rata minimal dua kali pengeliran atau pengecalan dengan bahan pengawet kayu

5. Semua konstruksi kayu harus disusun menurut gambar bestek. Pada sambungan kayu, supaya disusun menurut ketentuan PPKI antara lain memakai pen murbaul angkur, sengkang pelat, sengkang kalung dan lain sebagainya

6. TPL berhak memerintahkan untuk membuka sambungan - sambungan kayu, antara lain untuk mengetahui dan menyaksikan kebenaran daripada sambungan, pemasangan kayu dan lain sebagainya

7. TPL berhak juga untuk menolak dan memerintahkan penggantian pekerjaan kayu diatas, bilamana pekerjaan atau mutu bahan yang dipakai tidak sesuai dengan semua ketentuan yang ada

8. Penutup atap pakai genteng pres beton sesuai dengan apa yang diminta dalam RAB

9. Genteng yang akan dipakai alau asbes gelombang yang akan dipakai alau bahan lain yang akan dipakai, harus benar-benar berkualitas baik dan untuk penggunaannya contoh barangnya harus ditunjukkan dulu kepada Direksi atau Pemimpin Proyek untuk mendapatkan persetujuan pemakaian

10. Barang alau bahan bangunan penutup atap yang didatangkan yang akan dipergunakan untuk proyek ini, yang ternyata menyimpang dari yang sudah disetujui, akan ditolak. Semua resiko yang timbul akibat dilolaknya pemakaian barang dan bahan bangunan penutup atap tersebut, dilanggung sepenuhnya oleh Pemborong

11. Pemasangan bahan penutup atap, bila dipakai bahan genteng tradisional, harus rapat pemasangannya, rajin dan tidak bergelombang

12. Untuk pemasang genteng lubang, harus menggunakan spesi alau campuran adukan gembuk, sehingga bubungan tidak akan mudah bocor

Pekerjaan pemasangan genteng bubungan harus lurus, rajin dan rapi

13. Untuk pemasangan penutup atap yang pada bagian tepi atau pada akhiran pemasangannya memakai papan lis, maka papan lis ini supaya dibuat dan dikerjakan sebaik-baiknya, dengan dipasang Kios Papan lis tidak boleh melesing dan harus rata Pekerjaan pemasangan papan lis harus dengan kekuatan paku yang cukup, sehingga benar-benar kuat dan rajin.

C. Pekerjaan Penutup Atap

1. Syarat umum pekerjaan baja sepenuhnya mengikuti peraturan mengenai baja yang berlaku, dan semua bagian/bahan baja yang digunakan/dipasang harus dari mutu yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan pekerjaan baja dan hasilnya harus bermutu baik, dimana semua pekerjaan harus bebas dari puntiran, tekanan, hubungan terbuka dan harus mempunyai ukuran yang tepat, sehingga dalam pemasangan tidak memerlukan bahan pengisi, kecuali yang tercantum dalam gambar untuk itu.

3. Semua detail harus dilaksanakan dengan teliti sesuai dengan gambar untuk itu

4. Elektroda-elektroda las harus diambil dari GRADE-A (best, heavy coated type) batang-balang elektroda yang dipakai diameternya lebih besar alau sama dengan 6 mm (inch), dan batang-balang baut-baut yang mungkin digunakan harus baul hilam dengan tegangan baut dan tegangan las

minimum adalah 1.400 kg/cm² atau minimal sama dengan mutu baja yang digunakan

5. Baja sebelum dikerjakan harus diluruskan dengan toleransi yang diijinkan menurut standar yang berlaku dan alau diijinkan

- Batang profil tekan tidak diijinkan bengkok lebih dari 1/4000 kali panjang batang
- Batang profil harus bebas dari puntiran, lubang-lubang ataupun bengkokan-bengkokan

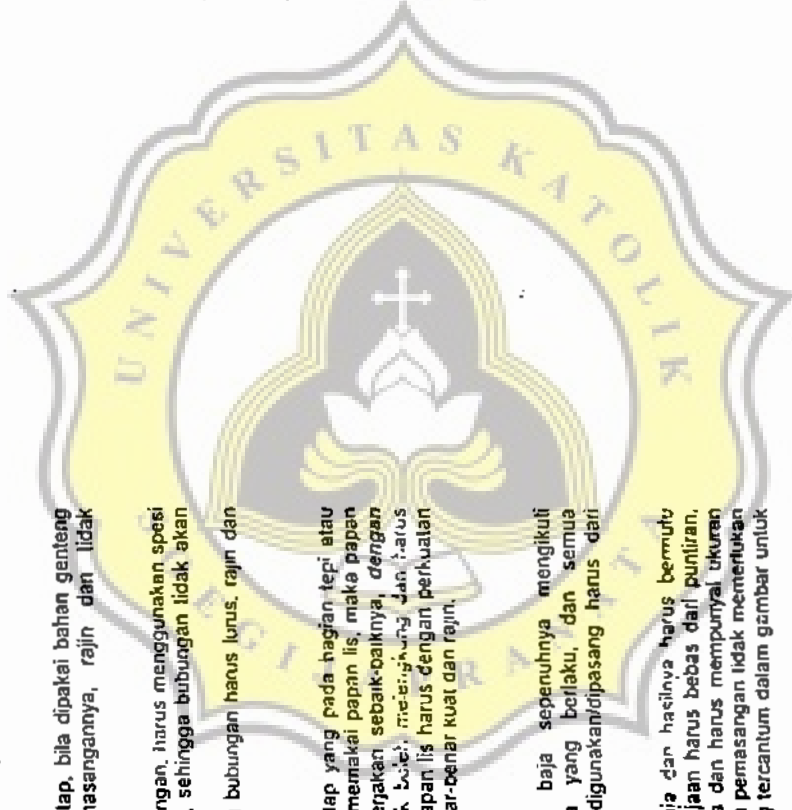
6. Sebelum pelaksanaan dimulai, pihak pelaksana harus memberikan contoh hasil pekerjaan tersebut kepada Tenaga Pengawas untuk dilakukan pengujian (test di laboratorium test) dan biaya untuk ini menjadi tanggungan pihak pelaksana dan setelah pemasangan, tempat-tempat yang tergores alau yang berkarat harus disikat bersih dengan sikat kawat dan dicat dengan "Galvanising revair paint" yang disetujui Koordinator Tenaga Pengawas.

7. Pemolongan dengan oksigen sebaiknya dilakukan dengan mesin yang standar

8. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin las listrik dengan hasil tebal las yang rata. Pekerjaan las sebanyak mungkin dikerjakan didalam bengkel untuk itu. Pekerjaan las yang dikerjakan di lapangan harus sama dengan standarnya dengan pekerjaan las yang dilakukan didalam bengkel dan tidak diperkenankan melakukan pekerjaan las dalam keadaan basah alau hujan

9. Juga harus diperhatikan :

- Pemukaan yang akan dilas harus bebas dari kotoran minyak, cat dan lain-lain bahan asing
- Cara pengelasan harus dilakukan menurut persyaratan yang berlaku alau disetujui Pengawas Lapangan
- Pada waktu pengelasan, profil-profil tidak terkena oleh las, sehingga luas efektif profil tidak berkurang akibat pengelasan
- Pengelasan diatas harus dilaksanakan pada saat konstruksi-konstruksi telah dalam keadaan diam (tidak berubah-ubah lagi)
- Las yang dipakai yaitu las sudut dan las lumpul
- Mulu las minimal harus sama dengan mutu dari profil-profil yang bersangkutan
- Pekerjaan pengelasan yang akan tampak harus dihaluskan sehingga sama dengan permukaan disekitarnya
- Baut yang akan digunakan adalah baut hilam. Dengan kekuatan minimum sama dengan kekuatan baut profil yang digunakan (ST.37)
- Lubang untuk sambungan baut harus dibor. Selisih diameter lubang dengan diameter baut tidak lebih dari 1 mm



- j. Pengelasan tidak boleh dilakukan jika temperatur dari base metal lebih rendah dari 0 F. Pada temperatur 0 F – 32 F, permukaan las dari titik dimulainya las sampai sejauh 7,5 cm juga harus dijaga temperaturnya sampai dengan waktu pengelasan.
- k. Pemberhentian las, harus pada tempat yang ditentukan dan harus dijamin tidak akan berputar atau membengkok.
- l. Setelah pengelasan maka sisa-sisa/terak-kerak las harus dibersihkan dengan baik.
10. Penghantaran ataupun penyelesaian (finishing) akibat pemotongan plat, tidak diperlukan kecuali jika ditentukan lain oleh Tenaga Pengawas dan dilakukan dengan alat/alat/perengkapan yang memenuhi syarat.
11. Jika diperlukan pengelasan harus dikerjakan dengan sistem mekanis ataupun dipanaskan setempat, dimana temperatur tidak boleh lebih dari 650 C.
11. Pada konstruksi kap, rangka-rangka harus koplanar, sesuai dengan gambar bestek. Kecuali ada insruksi khusus dari konsultan Pengawas
12. Pada bagian-bagian dimana konstruksi baja menumpu atau berhubungan langsung dengan beton, maka bagian beton tersebut harus sudah terpasang sekurang-kurangnya 28 hari setelah pengecoran dan dinyatakan kering.
13. Bagian profil baja harus diangkat dengan baik, dan tidak boleh terjadi puntiran-puntiran pada waktu pengangkatan.
14. Ikatan-ikatan sementara harus digunakan untuk mencegah legangan yang melewati legangan ijin dan ikatan sementara tersebut dibiarkan terpasang sampai pemasangan konstruksi selesai.
15. Untuk konstruksi kap sebelumnya harus diberikan anli (lawan) lendut sebesar 1/600 kali panjang bentang.
16. Bagian – bagian baja yang tertanam dalam beton harus dibersihkan sebelumnya dan tidak diperkenankan untuk dicat. Baja-baja konstruksi harus diberi lapisan cat sesuai dengan persyaratan pekerjaan pengecatan pasal 12. Permukaan baja yang sulit harus dicat sebelum pemasangan. Pemasangan baja yang sulit tercapai, harus dicat sebelum pemasangan.
16. Sebelum pengecatan dilakukan, profil baja harus disikat dengan sikat kawat baja sehingga dalam keadaan bersih, kering, bebas dari karat, bebas dari minyak dan debu-debu halus

Pasal 07 : PEKERJAAN CAT

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan cat, diantaranya ialah :

1. Pekerjaan cat kayu, antara lain meliputi :
 - 1.1. Pekerjaan cat kayu untuk kusen-kusen, balk kusen pintu, kusen jendela, kusen jendela penerangan atas dan lain sebagainya
 - 1.2. Pekerjaan cat kayu untuk semua rangka daun pintu kaca, daun jendela kaca, daun pintu panil dan lain sebagainya
 - 1.3. Pekerjaan cat kayu pada rangka-rangka bangunan, seperti cat kayu pada langit-langit exposed
 - 1.4. Pekerjaan cat kayu pada bagian-bagian pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya harus di cat kayu, seperti papan lis, konsol dan lain sebagainya
2. Pekerjaan cat besi, antara lain meliputi :
 - 2.1. Pekerjaan cat besi pada besi tralis kaca naco
 - 2.2. Pekerjaan cat besi pada bagian-bagian pekerjaan yang menurut sifat pekerjaannya harus dicat dengan cat besi
3. Pekerjaan cat tembok, antara lain meliputi :
 - 3.1. Pekerjaan cat tembok pada semua bidang dinding pasangan batu bata, baik yang berada di dalam maupun di luar bangunan
 - 3.2. Pekerjaan cat tembok pada semua bidang permukaan pekerjaan beton, seperti kolom, balok, langit-langit dan lain sebagainya
 - 3.3. Pekerjaan cat tembok pada permukaan bidang langit-langit asbes rata
 - 3.4. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya harus dicat dengan cat tembok, seperti pemasangan beton rooster, pagar halaman dan lain sebagainya
4. Pekerjaan pengeiran dan pengawetan kayu
 - 4.1. Pekerjaan pengeiran atau pekerjaan pengawetan kayu pada semua kayu kap
 - 4.2. Pekerjaan pengeiran atau pekerjaan pengawetan kayu pada semua kayu usuk dan kayu reng dan lain sebagainya

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan Cat Kayu
 - 1.1. Sebelum kayu dilakukan pengecatan dengan cat kayu, semua permukaan kayu supaya di cat meni dulu, baik untuk bidang kayu yang kelihatan, kayu yang akan tertanam maupun kayu yang akan dilekalkan

1.2. Pekerjaan meni kayu juga dilakukan untuk semua bidang permukaan kayu, baik pada kusen-kusen maupun pada bagian-bagian pekerjaan lainnya yang menurut sifat pekerjaannya harus atau akan dicat kayu

1.3. Setelah kayu selesai dimeni, kemudian diamlir rata. Pekerjaan pemlamliran dan penghalusan atau pengampelasan, dilakukan hingga mendapatkan permukaan bidang kayu yang rata dan halus serta siap untuk dilakukan pengecatan

1.4. Pekerjaan pengecatan kayu harus dilakukan minimal dua kali, sehingga didapatkan warna yang merata, halus dan mengkilap

1.5. Cat yang akan dipergunakan untuk pekerjaan pengecatan kayu ini, harus dari cat jenis kualitas baik dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi atau Pemimpin Proyek

Cat kayu yang dipergunakan minimal setara cat kayu merk Bee Brand

1.6. Warna cat akan ditentukan kemudian
Pemborong supaya mengajukan contoh atau daftar warna-warna cat yang akan dipergunakan dan keputusan pemilihan warna cat ada pada Pemimpin Proyek

2. Pekerjaan cat tembok

2.1. Semua permukaan dinding bangunan, harus dicat dengan cat tembok, demikian juga bagian-bagian pekerjaan yang disebutkan dalam RAB

2.2. Sebelum permukaan dinding bangunan dicat dengan cat tembok, maka permukaan dinding bangunan tersebut harus diamlir rata, kemudian dihaluskan sehingga siap untuk dilakukan pengecatan

2.3. Pengecatan dengan cat tembok harus dilakukan berulang-ulang sampai rata, minimal tiga kali pengecatan, sehingga akan diperoleh hasil pengecatan yang rapi, rata dan memuaskan

2.4. Permukaan langit-langit asbes rata juga harus dicat dengan cat tembok minimal tiga kali pengecatan, sampai tampak rata warnanya dan rapi

2.5. Pelaksanaan pekerjaan pengecatan tembok atau langit-langit jangan sampai mengotori lantai dan bagian-bagian pekerjaan lain, sehingga menimbulkan pemandangan yang kotor dan kurang sedap

2.6. Cat tembok yang dipergunakan untuk pekerjaan ini harus cat kualitas baik, minimal setara dengan cat tembok merk Decolli

Contoh cat tembok yang akan dipergunakan harus ditunjukkan dulu kepada Pemimpin Proyek untuk mendapatkan persetujuan pemakaian

2.7. Warna cat akan ditentukan kemudian

4. Pekerjaan pengeliran

4.1. Semua konstruksi kap kayu termasuk semua bagian-bagian pekerjaan dan kelengkapannya seperti kayu gording; muurlat; balok pincang; kayu usuk; kayu reng dan lain sebagainya

4.2. Pekerjaan pengeliran atau pengecatan dengan bahan pengawet kayu harus sampai rata minimal dua kali

4.3. Tlr yang dipakai untuk pekerjaan pengeliran harus berkualitas baik

4.4. Dalam melaksanakan pekerjaan pengeliran dan pengecatan dengan bahan pengawet kayu, jangan sampai mengotori lantai dan bagian-bagian pekerjaan lainnya

Pasal 08 : PEKERJAAN PLESTERAN DAN SIAR

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan plesteran dan siar antara lain meliputi

1. Pekerjaan plesteran pada semua pasangan dinding batu bata

2. Pekerjaan plesteran sudut siku pada tembok, pilar dan lain sebagainya

3. Pekerjaan plesteran beton yang dibuat

4. Pekerjaan plesteran sudut pada kolom atau pilar beton yang dibuat

5. Pekerjaan plesteran pada dinding septic tank dan bagian dasarnya

6. Semua pekerjaan yang pada gambar rencana dan RAB, dinyatakan atau ditunjuk sebagai pekerjaan plesteran atau pekerjaan siar
Atau semua pekerjaan yang setara teknis, harus diplesir atau disiar

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pada prinsipnya campuran adukan plesteran yang dipergunakan sesuai dengan campuran adukan untuk pasangannya, kecuali ditentukan lain

2. Campuran plesteran yang dipakai 1 PC + 5 pasir atau ditentukan lain seperti yang ditunjuk pada gambar rencana atau RAB
Atau akan ditetapkan pada waktu Pemberian Penjelasan Pekerjaan

3. Pemasangan yang akan diplesir, harus dibasahi air lebih dulu, agar pasangan yang ada tidak akan menyerap air plesteran, sehingga menyebabkan plesteran yang ditempelkan cepat kering

dan berakibat akan menimbulkan relax-relak atau pecah-pecah pada plesteran

4. Plesteran harus membentuk bidang yang rata, tegak lurus dan ralin
Pertemuan bidang harus membentuk sudut yang tajam atau alku
5. Untuk plesteran sudut dan plesteran beton digunakan campuran 1 PC + 3 pasir atau akan ditentukan lain. Plesteran sudut pada bagian akhir plesteran tembok atau pada bagian pekerjaan lainnya atau pada kolom atau pada pilar beton harus membentuk garis lurus dan masing-masing bidang permukaannya harus saling membentuk sudut yang benar-benar siku
6. Pasir yang dipakai untuk pekerjaan plesteran dan silar ini ialah pasir Muntian dan semen yang dipakai semen Nusantara atau semen cap Tiga Roda
7. Pasir yang akan dipergunakan untuk pekerjaan plesteran dan silar ini harus diayak lebih dulu
8. Untuk pekerjaan silar menggunakan campuran 1 PC + 3 pasir atau sesuai dengan yang ditentukan pada gambar rencana dan RAB
9. Untuk pekerjaan silar supaya dibuat dengan motif timbul, atau akan ditetapkan lain dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
10. Untuk pembuatan silar, supaya dibuat mengikuti alur-alur pertemuan pasangan batu, sehingga tampak baik dan rapi
11. Pasangan atau bidang beton yang akan diplesir supaya dibuat kasar dan dibasahi air lebih dulu agar plesteran yang ditempelkan bisa melekat dengan baik dan kuat

Pasat 09 : PEKERJAAN LANTAI

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan lantai, antara lain meliputi :

1. Pemasangan ubin pada semua ruangan, selasar dan lain sebagainya dengan ubin abu-abu polos ukuran 20 x 20 cm atau dengan ubin jenis lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada gambar rencana atau dalam RAB
2. Pekerjaan pemasangan ubin pada teras bangunan
3. Pekerjaan pemasangan ubin keramik pada seluruh lantai bangunan sesuai yang tercantum dalam RAB
4. Pekerjaan pasang ubin, baik ubin PC, ubin keramik, ubin porselin dan lain sebagainya pada bagian-bagian ruangan yang pada gambar rencana atau dalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan pasangan ubin tersebut

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Ubin yang dipakai untuk pekerjaan ini, selain pada kamar mandi atau WC ialah ubin PC warna abu-abu polos ukuran 20 x 20 cm. Atau menggunakan ubin jenis lain seperti ubin PC, warna ubin keramik dan lain sebagainya, sesuai yang diminta pada gambar rencana dan RAB
2. Contoh ubin PC atau ubin keramik atau ubin porselin dan lain sebagainya yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini harus ditunjukkan dulu pada Pemimpin Proyek untuk mendapatkan persetujuan pemakaian
3. Pemasangan ubin PC, ubin keramik atau ubin porselin atau dan lain sebagainya harus selizin dan sepengetahuan TPL
4. Dibawah pemasangan ubin supaya diberi lapisan pasir pasang, kecuali untuk pekerjaan pemasangan ubin keramik, ubin porselin.
5. Tabal lapisan pasir pasang, minimal sesuai dengan yang tercantum pada gambar rencana
Lapisan pasir dibawah pemasangan ubin harus benar-benar padat Untuk pemadatan perlu disiram air yang cukup, kemudian dipadatkan lapis demi lapis, sehingga benar-benar padat dan mencapai kelingkaran atau sesuai dengan tebal yang telah ditentukan pada gambar-gambar rencana
6. Adukan perekat untuk pemasangan ubin memakai campuran 1 PC + 6 pasir atau memakai campuran lain sesuai yang ditentukan pada gambar rencana atau dalam RAB
7. Setelah ubin terpasang semuanya dengan alur-alurnya lurus dan sama lebarnya, baru lubang celah-celah alur tersebut dikolot dengan air semen, baik dengan semen abu-abu atau dengan semen putih atau dengan semen warna sesuai dengan ubin yang dipakai dan warna yang dipilih hingga penuh. Setelah hampir kering kolotan semen tersebut supaya segera dibersihkan sampai benar-benar bersih
8. Pada waktu pemasangan ubin, harus memperhatikan kerapian pemasangannya agar semua lantai membentuk bidang yang rata dan dalar
Dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada lantai kamar mandi atau WC, lantai teras, lantai pada jalan penghubung dan lain sebagainya supaya dibuat miring sedikit kearah luar dan kearah lubang-lubang pembuangan, sehingga air cepat terbuang dari lantai tersebut
9. Pemasangan ubin didalam ruangan supaya dilakukan setelah semua pekerjaan selesai, kecuali pekerjaan pengecatan
10. Pemasangan ubin harus benar-benar rapi, ralin, rata dan baik
11. Pemasangan ubin keramik, ubin porselin dan ubin mozaik, adukan campuran yang dipakai sebagai perikat, hanya berupa semen saja

12. Pemasangan ubin porselin atau ubin keramik pada dinding, harus benar-benar legak lurus dengan bidang dasarnya, dalar dan rapi
13. Pertemuan susuf harus benar-benar membentuk sudut siku dan rapi
14. Ubin pC, ubin keramik, ubin teraso, ubin porselin dan lain sebagainya yang pecah atau cacat sama sekali tidak boleh dipasang
15. Polongan ubin pada bagian tepi, harus rapi dan diusahakan pemotongannya dengan alat pemotong ubin khusus
18. Kotoran dan noda-noda yang terdapat pada ubin yang dipasang supaya dibersihkan sebaik-baiknya

Pasal 10 : PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan pemasangan Instalasi listrik, antara lain meliputi :

1. Pekerjaan pemasangan Instalasi listrik untuk penerangan baik untuk didalam maupun di luar bangunan
2. Pekerjaan pemasangan Instalasi listrik untuk peralatan-peralatan mechanical
3. Pekerjaan pemasangan Instalasi listrik untuk taman, lampu penerangan jalan dan lain sebagainya
4. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya memerlukan tenaga listrik

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan pemasangan Instalasi listrik, supaya dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu Biro Teknik Listrik atau B.T.L yang diakui dan sudah mempunyai izin serta referensi kerja dari PLN, serta sudah mendapat persetujuan dari Pemimpin Proyek
2. Untuk pekerjaan pemasangan Instalasi listrik, supaya dilaksanakan oleh instalatir yang cakap, ahli dan berpengalaman
3. Dalam melaksanakan pekerjaan Instalasi listrik, supaya memperhatikan semua ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh PLN, dan juga PULL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik yang ada
4. Pemasangan Instalasi listrik harus sampai menyala. Atau akan ditetapkan lain sesuai dengan yang ditentukan dalam RAB, dan dalam Risaiah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang ada

5. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik ini, Instalatir harus menempatkan seorang Pimpinan dan Pengawas yang cakap dan berpengalaman
6. Instalasi listrik ini diperhitungkan untuk dapat dipergunakan pada tegangan 220 Volt dan dinyalakan dengan tes beban sebesar 2000 VA atau sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian
7. Biaya penyambungan atau pengurusan untuk memperoleh izin penyampungan Instalasi listrik ini ke PLN dibebankan kepada Pemborong
8. Gambar ekema atau diagram rencana pemasangan Instalasi yang dibuat oleh Instalatir dan yang sudah diserahkan alau telah mendapatkan persetujuan PLN, supaya diserahkan kepada Pemimpin Proyek sebanyak 2 (dua) ganda, pada waktu penyerahan pekerjaan yang pertama
9. Instalasi listrik yang dikerjakan adalah instalasi listrik dengan pipa-pipa atau kabel-kabel yang tertanam didalam dinding (inbow)
10. Jenis dan jumlah titik lampu menyesuaikan dengan gambar rencana yang ada
11. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik ini, semua komponen dan peralatan instalasi listrik yang diperlukan supaya dipasang yang baik dan rapi serta dari kualitas yang baik
12. Untuk pengujian dan pengesahn pemasangan Instalasi listrik ini, beserta semua perengkapannya akan dilakukan oleh DKP atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan Seksi Listrik
13. Pemasangan titik lampu, lengkap dengan bola lampunya. Besarnya daya listrik masing-masing bola lampu 25 Watt, atau akan ditetapkan kemudian. Atau sesuai dengan yang tercantum dalam RAB

Pasal 11 : PEKERJAAN LAIN-LAIN

A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan lain-lain ialah :

1. Pekerjaan pembuangan sisa galian tanah
2. Pekerjaan pembersihan lapangan
3. Semua pekerjaan yang tercantum dalam RAB
4. Pekerjaan pemasangan Instalasi listrik
5. Pekerjaan penyelesaian akhir

B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan pembuangan sisa galian tanah
 - 1.1. Sisa galian tanah yang tidak dipakai, harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan alas beban Pemborong
 - 1.2. Bilamana tanah tersebut akan diperlukan, maka TPL akan menuliskan tempat dimana tanah tersebut harus dibuang
 - 1.3. Tempat pembuangan tanah supaya dipilihkan tempat yang baik dapat menampung dan tidak akan menimbulkan gangguan serta pencemaran lingkungan
2. Pekerjaan pembersihan lapangan
 - 2.1. Sebelum pekerjaan diserahkan kepada Pemberi Tugas, maka lokasi bangunan harus dibersihkan dari kotoran dan bekas-bekas bahan bangunan yang dipakai
 - 2.2. Permukaan tanah yang tidak rata, supaya diratakan. Demikian juga untuk kelancaran pembuangan air hujan supaya dipikirkan dengan sebaik-baiknya misalnya dengan membuat saluran tanah seperfektifnya
3. Semua pekerjaan yang tercantum dalam RAB
 - 3.1. Semua pekerjaan yang tercantum dalam RAB tanpa kecuali harus dipenuhi oleh Pemborong dengan sebaik-baiknya
 - 3.2. Dalam pelaksanaannya supaya memperhatikan juga petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Pengawas Lapangan
4. Pekerjaan instalasi listrik
 - 4.1. Pekerjaan Instalasi listrik harus dikerjakan sebelum pekerjaan plesteran.
 - 4.2. Pemasangan penangkal petir, supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada
5. Pekerjaan penyelesaian akhir
 - 5.1. Semua cacat-cacat dan kekurangan sempurnaan pekerjaan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan atau akibat dari kurang baiknya mutu bahan yang dipakai, maka Pemborong harus bersedia untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan, baik mendapat perintah atau tidak dari TPL
 - 5.2. Semua pekerjaan sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas maka Pemborong harus memeriksa kembali apakah pekerjaan yang dilaksanakan itu perlu disempurnakan lagi atau sudah pantas untuk diserahkan

BAB IV PENUTUP

- Pasal 01 :** Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) berhak untuk menolak bahan bangunan yang didalangan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, jika tidak sesuai dengan syarat-syarat teknik tersebut diatas
- Penaga Pengawas Lapangan (TPL)** juga berhak untuk memerintahkan penggantian pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemborong, bila ternyata pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mutu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam uraian, syarat-syarat teknik serta gambar rencana yang ada
- Pasal 02 :** Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Uraian dan Syarat-syarat Teknik ini, akan diberikan kemudian pada saat Pemberian Penjelasan Pekerjaan dan juga oleh Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) dalam Pelaksanaan Pekerjaan nanti
- Pasal 03 :** Semua pekerjaan yang termasuk pekerjaan Pelaksanaan, tetapi tidak dijelaskan dalam Uraian dan Syarat-syarat Teknik ini, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemborong, seolah-olah pekerjaan itu telah diuraikan supaya tercapai penyelesaian pekerjaan yang memuaskan
- Pasal 04 :** Antara gambar rencana kerja dan syarat-syarat teknik serta Rincian Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan, merupakan satu kesatuan yang sifatnya saling melengkapi dan mengikat.

Semarang, 9 Agustus 1989

Ketua Panitia Lelang

Mengeluh

Pemimpin Proyek

[Signature]

Kusnoro Ujianto
NIP. 500 043 669

Henningath. SH
NIP. 500 043 676

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 27 Sept 2000.

Nomor : 070/ **5110** /IX/2000.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijanranata Semarang No. B.2.02/053/UKS.05/IX/2000 tgl 26 Sept 2000 tentang maksud Sdr. SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI akan mengadakan penelitian berjudul :
" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONTRUKSI BERSTATUS H RIAN LEPAS PADA PT. KARASEWO SEMARANG ", untuk skripsi.

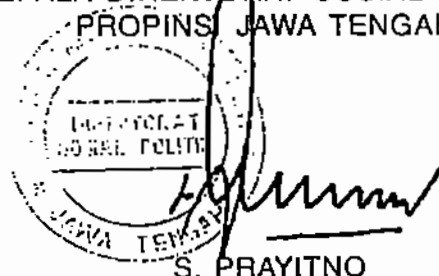
Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 2 Okt - 1 Jan 2001
Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjl@indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 4960 / P / IX / 2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 27 September 2000 no. 070 / 5110 / IX / 2000
2. Surat dari Dekan FM UNIKA Seogjapranata Semarang
tgl. 26 September 2000 nomor B.2.02/053/UKS.05/IX/2000

III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Kimibalu No. 29 RT 01/II Semarang
4. Penanggungjawab : Y. EMBANG WAHYATI, SH, MH :
5. Maksud tujuan : untuk Skripsi Judul :
research/survey " PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA
KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT
KARANGSEWU SEMARANG "
6. Lokasi : Kota Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

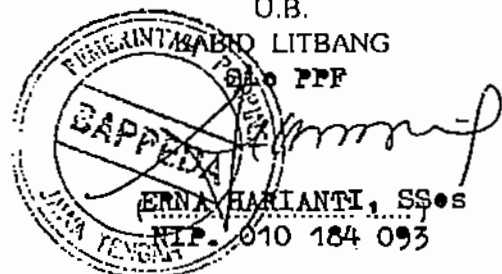
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
2 Oktober 2000 s.d 1 Januari 2001

Dikeluarkan di: SEMARANG
Pada tanggal : 27 September 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

TEMBUSAN :

1. ~~Bakorstanasda Jateng / DIY.~~
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. ~~Bupati~~ Walikota ~~madia~~ Semarang
5. Arsip.





pt. KARANGSEWU

JL. CITARUM SELATAN NO. 38 SEMARANG
JL. MAJAPAHIT NO. 591 TELP. 024-6708014 - FAX. 024-414841

Bank : BPD Jateng
Anggota Gapensi
Nomor : 11/33/0005

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : Ket. 010/I/KS/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Sunandar Widjaja
J a b a t a n : Direktur II PT. KARANGSEWU

Dengan ini menerangkan, bahwa :

N a m a : Sri Purwestri Yuana Setyowati
Nim / Nirm. : 95.20.1309 / 95.6.111.01000.50103
Fakultas : Hukum, Universitas Katolik
Soegijapranata

Benar - benar telah melakukan Survey / Penelitian di-
P.T. KARANGSEWU, SEMARANG, pada tanggal 1 Nopember 2000
sampai dengan 20 Desember 2000, untuk memperoleh bahan
bahan yang diperlukan bagi penyusunan Skripsi yang ber-
judul :

" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA
KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA
P.T. KARANGSEWU SEMARANG "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2001

PT. KARANGSEWU

p.t. KARANG SEWU

JL. CITARUM SELATAN 38

TELP. 288851

SEMARANG

(Sunandar Widjaja)

Direktur II



SURAT KETERANGAN

Nomor : KET/ 28/122000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : *Hj. Helmi Setiani, SE*
Jabatan : *Kabid. Umum & SDM*
Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero)
Semarang

Menerangkan bahwa :

N a m a : *SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI*
N I M : *95.20.1309*
UNIVERSITAS : *UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA*
SEMARANG

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian / Riset pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Semarang terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2000 sampai dengan 30 Nopember 2000 dengan baik.

Telah diberikan bimbingan dan pengarahan untuk pembuatan Skripsi dengan judul :
“ PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONSTRUKSI
BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT KARANGSEWU SEMARANG “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : Di Semarang
PADA TANGGAL : 04 Desemebr 2000


JAMSOSTEK
• KANTOR CABANG
Hj. Helmi Setiani, SE
Bidang Umum & SDM